



LAPORAN KINERJA | 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPMUKP - Setjen KKP



KATA PENGANTAR

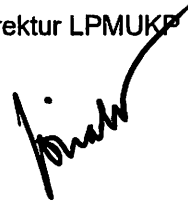
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan Satuan Kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016, ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. LPMUKP bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengelolaan dana bergulir pada tahun 2022, LPMUKP sesuai dengan tugasnya akan memberikan layanan pinjaman atau pembiayaan modal usaha yang berpendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPMUKP juga tidak terlepas dari tugasnya sebagai Satuan Kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuatlah Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai laporan yang memuat tentang capaian kinerja BLU LPMUKP selama Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 19 Januari 2023

Direktur LPMUKP



I Nengah Putra Winata

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan pelaporan gambaran atas target kinerja yang telah disepakati melalui perjanjian kinerja antara LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal KKP pada Tahun Anggaran 2022. Perjanjian kinerja kepada Sekretariat Jenderal KKP dijabarkan menjadi 10 Indikator Kinerja dengan satu sasaran kegiatan.

Capaian atas target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja LPMUKP kepada Setjen KKP berdasarkan Indikator Kinerja Utama dilihat dari realisasi persentase pencapaian dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi PNBPN BLU

Target realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.48 Miliar dengan realisasi capaian sebesar Rp.43 Miliar sehingga persentase capaian kinerja dari IKU ini adalah sebesar 89,33%.

2. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Target realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.600 Miliar dengan realisasi sebesar Rp.133 Miliar sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 22,20%.

3. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Target dari IKU rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah maksimal 5% dengan realisasi capaian sebesar 8,25% sehingga apabila mangacu pada manual IKU yang tersedia maka persentase capaian dari IKU ini adalah sebesar 60%.

4. Modernisasi BLU

Target realisasi modernisasi BLU Tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 74,75% sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 74,75%.

5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

Target nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP Tahun 2022 adalah sebesar 92 dengan realisasi capaian sebesar 89,16 sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 96,91%.

6. Nilai Kinerja Anggaran BLU LPMUKP

Target Nilai Kinerja Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2022 adalah sebesar 81 dengan realisasi capaian sebesar 80,19 sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 99%.

7. Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
Target Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2022 adalah sebesar 88% dengan realisasi capaian sebesar 98,44% sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 111,86%.
8. Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2021 lingkup BLU LPMUKP
Target Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2021 lingkup BLU LPMUKP Tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 100% sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 100%.
9. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP
Target Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2022 adalah sebesar 70% dengan realisasi capaian sebesar 100% sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 120%. Nilai tersebut sesuai dengan nilai maksimal pada aplikasi Kinerjaaku.
10. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP
Target realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 85% dengan realisasi capaian sebesar 84,99% sehingga persentase capaian dari IKU ini adalah 99,99%.

Selanjutnya, dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP terus meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagai suatu komitmen dalam melaksanakan program pengelolaan dana bergulir dengan menyediakan pembiayaan atau pinjaman yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya sektor kelauran dan perikanan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia LPMUKP	4
1.5. Visi dan Misi LPMUKP	12
1.6. Tugas dan Fungsi LPMUKP.....	13
1.7. Budaya Organisasi	13
1.8. Potensi dan Permasalahan	15
1.9. Sistematika Penulisan Laporan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Kerja LPMUKP.....	17
2.2. Perjanjian Kinerja	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja LPMUKP.....	26
3.2. Kinerja Keuangan.....	53
3.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2020	57
BAB IV. PENUTUP	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP.....	5
2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai LPMUKP Tahun 2022.....	8
3. Tabel 1.3 Klasifikasi SDM LPMUKP.....	11
4. Tabel 2.1 Tarif Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP.....	18
5. Tabel 2.2 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP.....	21
6. Tabel 2.3 Jumlah Potensi Target Pemanfaat Dana Bergulir LPMUKP.....	22
7. Tabel 2.4 Proyeksi Pendapatan LPMUKP Tahun 2022.....	22
8. Tabel 2.5 Target Kontrak Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2022.....	23
9. Tabel 3.1 Capaian IKU BLU LPMUKP Tahun 2022.....	27
10. Tabel 3.2 Target realisasi PNBPN BLU.....	28
11. Tabel 3.3 Rincian PNBPN BLU per Bulan.....	28
12. Tabel 3.4 Perbandingan Capaian PNBPN.....	29
13. Tabel 3.5 Target Penyaluran Dana Bergulir.....	31
14. Tabel 3.6 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir per Sektor Usaha.....	31
15. Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU Realisasi Penyaluran Dana Bergulir.....	32
16. Tabel 3.8 Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	35
17. Tabel 3.9 Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	35
18. Tabel 3.10 Realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	36
19. Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	36
20. Tabel 3.12 Target Modernisasi Pengelolaan BLU.....	38
21. Tabel 3.13 Realisasi target Modernisasi Pengelolaan BLU.....	38
22. Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Modernisasi BLU.....	40
23. Tabel 3.15 Skor Aspek Penilaian Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP.....	41
24. Tabel 3.16 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP.....	42
25. Tabel 3.17 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal KKP.....	43
26. Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP.....	44
27. Tabel 3.19 Target Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup LPMUKP.....	45
28. Tabel 3.20 Capaian IKU MP lingkup Sekretariat Jenderal.....	45
29. Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja MP.....	46
30. Tabel 3.22 Target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2021 Lingkup BLU LPMUKP.....	47
31. Tabel 3.23 Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat Jenderal.....	48

32. Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPMUKP	48
33. Tabel 3.25 Target Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP	49
34. Tabel 3.26 Rekap Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	49
35. Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	50
36. Tabel 3.28 Realisasi Anggaran LPMUKP per 31 Desember 2022.....	51
37. Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP.....	52
38. Tabel 3.30 Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	56
39. Tabel 3.31 Daftar Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2022.....	57
40. Tabel 3.32 Pemberitaan BLU LPMUKP melalui Media <i>Online</i>	61
41. Tabel 3.33 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2022	66
42. Tabel 3.34 Perhitungan Efisiensi Anggaran LPMUKP Tahun 2022	67

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMUKP.....	4
2. Gambar 1.2 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP	5
3. Gambar 1.3 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP	8
4. Gambar 1.2 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP	9
5. Gambar 1.3 Komposisi Pegawai LPMUKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	11
6. Gambar 3.1 <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Tahun 2022 LPMUKP pada aplikasi Kinerjaku	26
7. Gambar 3.2 Dokumentasi Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun 2022 ...	34
8. Gambar 3.3 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART	43
9. Gambar 3.4 Tampilan Posting pada Aplikasi Bitrix LPMUKP	47
10. Gambar 3.5 Persentase Realisasi Anggaran per KRO.....	51
11. Gambar 3.6 Perkembangan Pendapatan PNBPN BLU	54
12. Gambar 3.7 Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBN LPMUKP Tahun 2022.....	55
13. Gambar 3.8 BLU LPMUKP dalam Media Sosial.....	59
14. Gambar 3.9 Tampilan <i>Website</i> LPMUKP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (termasuk dana bergulir) yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian pengaturan terkait Badan Layanan Umum (BLU) tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lemabga, dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (Satker BLU). Atas dasar hal tersebut, dibentuklah satuan kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai BLU dengan rumpun pengelolaan dana bergulir di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LPMUKP ditetapkan menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum dengan status penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kemudian pada Tahun 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan terkait struktur organisasi dan tata kelola BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Tugas dan fungsi utama BLU LPMUKP sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 3 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang kemudian dilakukan melalui tiga skema penyaluran dana bergulir yaitu model penyaluran langsung kepada UMKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 4/PER-LPMUKP/2017, kemudian model penyaluran melalui LKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 3/PER-LPMUKP/2017 serta model penyaluran melalui LKB/LKBB lainnya.

BLU LPMUKP diberikan dana kelolaan pada Tahun 2017 sebesar Rp.500.000.000.000,00 yang kemudian dana kelolaan tersebut diberikan tambahan sebesar Rp.850.000.000.000,00 pada Tahun 2018, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1.350.000.000.000,00. Sejak tahun pertamanya hingga akhir Desember 2021, dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir, LPMUKP telah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat kelautan dan perikanan sebesar Rp.872.616.798.490,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 24.217 jiwa. Dengan adanya program penyaluran dana bergulir yang dikhususkan untuk masyarakat kelautan dan perikanan, diharapkan mampu untuk mendongkrak ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan membiayai pelaku usaha yang bersifat nonbankable yang diberikan pendampingan selama menjadi debitur LPMUKP hingga pelaku usaha atau kelompok usaha tersebut menjadi bankable.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2022 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pelaporan kinerja dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai suatu wadah atau sarana untuk mengkomunikasikan/mempublikasikan capaian kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

1.3. Tugas dan Fungsi LPMUKP

Sesuai pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara, LPMUKP perlu ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Untuk mendukung hal tersebut, pada tanggal 20 September 2016 LPMUKP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016. Melalui penetapan PPK BLU, diharapkan LPMUKP mampu menjalankan peran pemerintah sebagai salah satu solusi atas permasalahan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Adanya alokasi dana kelolaan sektor kelautan dan perikanan yang dikelola oleh LPMUKP tentu menuntut hadirnya tata kelola organisasi yang baik serta perencanaan bisnis dan penganggaran yang matang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti risiko operasional, hukum, kredit macet dan bermasalah serta risiko lainnya, di samping untuk memberikan pelayanan pinjaman atau pembiayaan yang optimal pada masyarakat kelautan dan perikanan. Seiring dengan perkembangan LPMUKP yang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU, Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

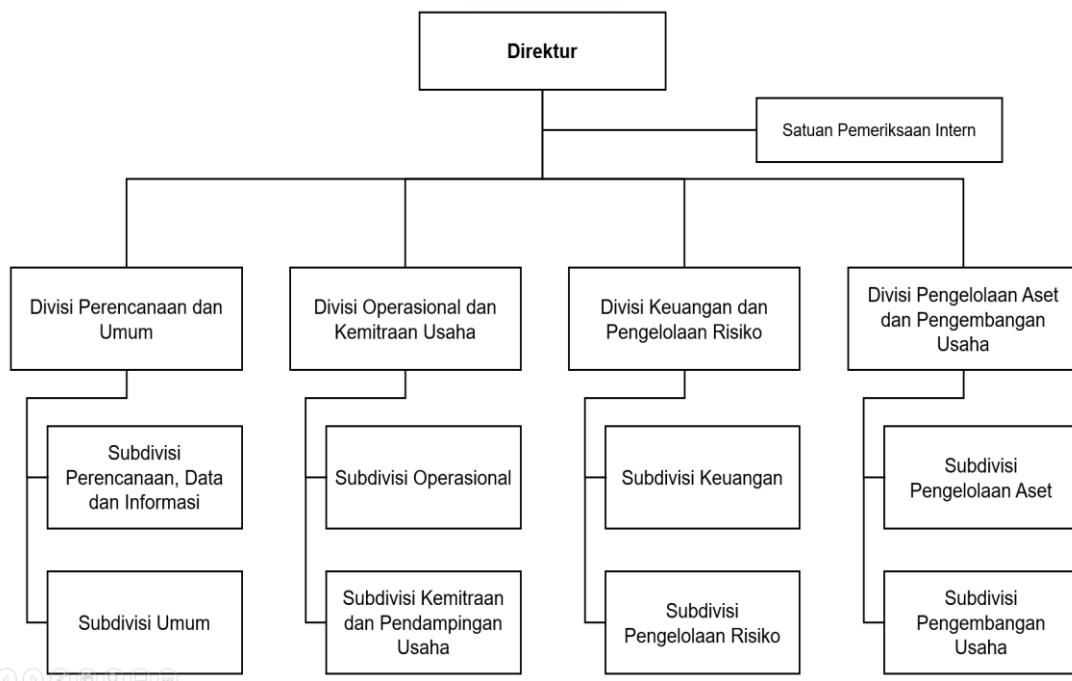
Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPUMKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

1.4. Sumber Daya Manusia LPMUKP

1.4.1. Organisasi BLU LPMUKP

Penetapan BLU LPMUKP sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Adapun struktur organisasi BLU LPMUKP dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMUKP

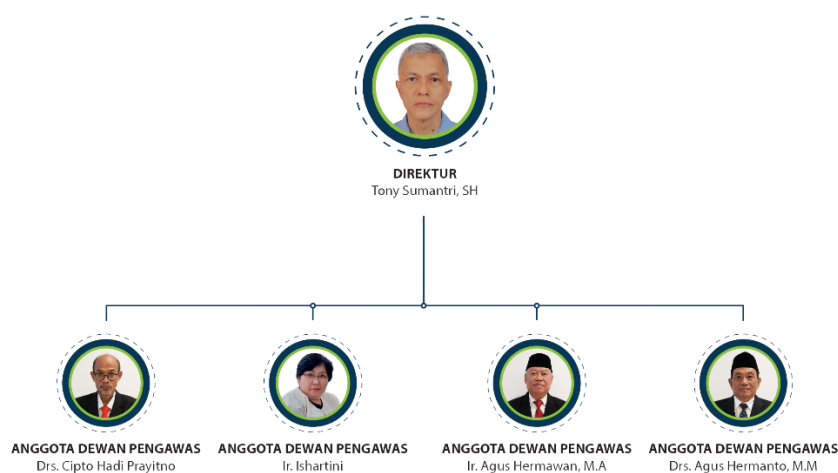
A. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLU LPMUKP mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan BLU LPMUKP mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait operasional Satker LPMUKP. Untuk lebih jelasnya, susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP

No	Nama	Jabatan	Nomor SK
1.	Tony Sumantri	Ketua Dewan Pengawas	57/KEPMEN-KP/2021
2.	Cipto Hadi Prayitno	Anggota Dewan Pengawas	57/KEPMEN-KP/2021
3.	Ishartini	Anggota Dewan Pengawas	57/KEPMEN-KP/2021
4.	Agus Hermanto	Anggota Dewan Pengawas	57/KEPMEN-KP/2021
5.	Agus Hermawan	Anggota Dewan Pengawas	58/KEPMEN-KP/2022

Gambar 1.2 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Paragraf 2 yang mengatur mengenai Dewan Pengawas, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU. Kewajiban, wewenang dan larangan Dewan Pengawas BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Dewan Pengawas
 - a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
 - b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;

- d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- f. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/ atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah di tindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewenangan Dewan Pengawas

- a. memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- e. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/ atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
- h. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- i. berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- j. meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;

- k. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- l. menunjuk kantor akuntan publik; dan
- m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Larangan Dewan Pengawas

- a. melakukan tindakan yang kepentingan mempunyai benturan (*conflict of interest*) dan/ atau memanfaatkan pqsisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLU, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan;
- c. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLU atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLU; dan
- d. mengintervensi pelaksanaan dan/ atau ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BLU yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLU melebihi kewenangan Dewan Pengawas kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Pejabat Pengelola

Pejabat pengelola di lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan terdiri dari:

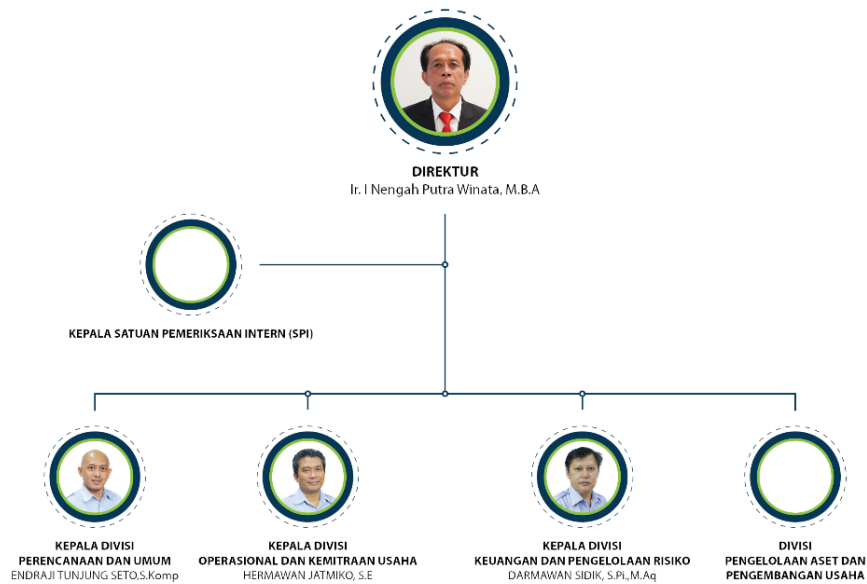
- a. Direktur selaku Pimpinan BLU LPMUKP;
- b. Pejabat Pengelola Teknis BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Perencanaan dan Umum, serta Divisi Operasional dan Kemitraan;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko;
- d. Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, susunan direksi dan manajemen BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP

NO	NAMA	POSISI	NOMOR SK
1.	I Nengah Putra Winata	Direktur	08/MEN-KP/KP.430/II/2022
2.	Endraji Tunjung Seto	Kepala Divisi Perencanaan dan Umum	04/KEP-LPMUKP/II/2017
3.	Hermawan Jatmiko	Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha	04/KEP-LPMUKP/II/2017
4.	Darmawan Sidik	Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko	28/KEP-LPMUKP/2022

Gambar 1.3 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP



1) Direktur BLU LPMUKP

Direktur BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan BLU LPMUKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan BLU LPMUKP;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan Pelaporan keuangan;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

2) Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP dalam pelaksanaannya mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas BLU LPMUKP.

3) Divisi Perencanaan dan Umum

Divisi Perencanaan dan Umum BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana kerja dan anggaran, urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan. Divisi Perencanaan dan Umum dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kajian pengelolaan dana; dan
- c. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

Divisi Perencanaan dan Umum dalam penyelenggaraannya terdiri dari 2 (dua) subdivisi, yaitu:

- a. Subdivisi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana kerja dan anggaran, serta pelaksanaan kajian pengelolaan dana.
- b. Subdivisi Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

4) Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha

Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan, pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kerja sama dengan stakeholders,

pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan stakeholders;
- d. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha terdiri dari 2 (dua) subdivisi, yaitu:

- a. Subdivisi Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan, pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Subdivisi Kemitraan dan Pendampingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan stakeholders, pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan.

5) Divisi Keuangan dan Pengelola Risiko

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan anggaran dan keuangan, pelaksanaan transaksi, penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan, pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penilaian kelayakan proposal pinjaman, dan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan;
- b. Pelaksanaan transaksi penyaluran dana;
- c. Pelaksanaan penyusunan sistem akuntansi dan laporan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengembangan dana kelolaan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan penilaian kelayakan proposal pinjaman; dan

f. Pelaksanaan pengelolaan risiko, investasi, dan aset.

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Resiko terdiri dari 2 (dua) subdivisi, yaitu:

- a. Subdivisi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan, transaksi penyaluran dana, penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan, serta pengembangan dana kelolaan dan pendapatan.
- b. Subdivisi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kelayakan proposal pinjaman, pengelolaan risiko, investasi, dan aset.

1.4.2. Sumber Daya Manusia BLU LPMUKP

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor determinan dalam sebuah organisasi. Kualitas SDM pada suatu organisasi sangat menentukan arah keberhasilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil kinerja yang optimal tentu menuntut adanya dukungan dan manajemen SDM yang prima.

Sebagaimana layaknya institusi yang bergerak di bidang finansial, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan dalam rangka persiapan operasional penyaluran dana bergulir, LPMUKP pada 31 Desember 2022 didukung oleh SDM sebanyak 321 orang. LPMUKP terus berusaha secara optimal untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan, dalam rangka tetap memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional, produktif, efektif, dan efisien serta akuntabel guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir. Secara rinci, klasifikasi sumber daya manusia pada LPMUKP dapat dilihat pada **Tabel 1.3** sebagai berikut.

Tabel 1.3. Profil SDM LPMUKP Tahun 2022

No	Status Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Kontrak	174	54,21%
2	Pegawai Tetap Non PNS	142	44,24%
3	PNS	5	1,56%
Total		321	100%

No	Jabatan	Jumlah
1	Direktur	1
2	Kepala SPI	-
3	Kadiv	3
4	Kasubdiv	6
5	Staf	311
Total		321

No	Agama	Jumlah
1	Hindu	6
	Laki-Laki	5
	Perempuan	1
2	Islam	276
	Laki-Laki	197
	Perempuan	79
3	Katolik	12
	Laki-Laki	10
	Perempuan	2
4	Kristen	27
	Laki-Laki	21
	Perempuan	6
Total		321

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	233	72,59%
2	Perempuan	88	27,41%
Total		321	100%

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	16	4,98%
2	S1	248	77,26%
3	D4	44	13,71%
4	D3	8	2,49%
5	SMA	5	1,56%
Total		321	100%

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	129	40,19%
2	31-40	133	41,43%
3	41-50	47	14,64%
4	>50	12	3,74%
Total		321	100%

1.5. Visi dan Misi LPMUKP

A. Visi

Menjadi lembaga pengelola modal usaha produktif yang profesional, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan dalam visi tersebut, maka LPMUKP mempunyai misi:

- a. Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan;
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan;
- d. Meningkatkan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan terkait pengaturan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan.

1.6. Tugas dan Fungsi LPMUKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPUMKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

1.7. Budaya Organisasi

LPMUKP menerapkan prinsip-prinsip yang senantiasa dijalankan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menjadi budaya yang melekat pada setiap elemen LPMUKP. Hal ini bertujuan agar LPMUKP dapat mencapai kinerja terbaik dan memenuhi ekspektasi yang ada. Prinsip-prinsip dalam tata kelola LPMUKP adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

LPMUKP menerapkan keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi, keterbukaan dalam penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu dan diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan serta keterbukaan dalam pengelolaan yang relevan dengan organisasi.

2. Akuntabilitas

LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada LPMUKP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan program pelayanan publik namun juga meliputi akuntabilitas baik dari aspek kegiatan maupun aspek keuangan LPMUKP.

3. Responsibilitas

Pengelola organisasi LPMUKP harus senantiasa memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat. LPMUKP juga menetapkan tugas dan kewenangan pengelola LPMUKP yang ada, baik melalui Tata Kelola LPMUKP maupun melalui penjabaran lebih lanjut dalam SOP, Juknis dan pengaturan lain yang ada. Seluruh elemen LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

4. Independensi

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi LPMUKP secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai etika dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Adanya prinsip ini memberikan kesadaran kepada seluruh pegawai LPMUKP tentang asas *prudent dan proper* dalam pelaksanaan tugas.

5. Integritas

Prinsip ini berisi komitmen yang tinggi dari LPMUKP untuk mencapai hasil terbaik untuk organisasi melalui pengelola organisasi yang jujur dan kompeten, percaya diri, dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan program-program organisasi. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip kewajaran yang ditunjukkan dengan adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*

LPMUKP yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.8. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

LPMUKP dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pengelola dana bergulir yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat kelautan dan perikanan tentu perlu memetakan potensi yang dimiliki oleh BLU LPMUKP untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh BLU LPMUKP antara lain:

1. Ketersediaan dana kelolaan yang mencukupi dan sesuai dengan target penyaluran dana bergulir Tahun 2022;
2. Dukungan SDM LPMUKP sebagai *supporting* dalam pencapaian IKU lembaga;
3. Potensi pelaku usaha perikanan yang diperkuat dengan data potensi pelaku usaha yang bersumber dari *website* KUSUKA KKP;
4. Produk layanan LPMUKP dengan skema pembiayaan yang murah sebagai program pemberdayaan masyarakat melalui dukungan permodalan;
5. Felksibilitas pengelolaan anggaran yang bersumber dari PNBPNP;

B. Permasalahan

Untuk mengoptimalkan kinerja LPMUKP, masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi untuk mendapatkan upaya penyelesaian di Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Tipologi pemanfaat penerima dana bergulir yang mayoritas merupakan perorangan. Sehingga sangat berpengaruh pada jumlah penyaluran dana bergulir yang diakses;
2. Pemahaman masyarakat terhadap program pembiayaan dana bergulir LPMUKP relatif rendah dan *statement* masyarakat terhadap program LPMUKP masih berupa bantuan;
3. Kondisi pasca pandemi *covid-19* yang berdampak pada kondisi usaha debitur LPMUKP;

1.9. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menyajikan uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi LPMUKP termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKJ.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Menyajikan uraian perencanaan kinerja BLU LPMUKP dari sasaran strategis hingga arah dan kebijakan untuk BLU LPMUKP pada Tahun 2022.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menyajikan capaian indikator kinerja utama serta analisis kinerja LPMUKP Tahun 2022.
4. Bab IV Penutup
Menyajikan keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja utama serta upaya perbaikan kedepan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kerja LPMUKP

BLU LPMUKP merupakan Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710 Tahun 2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tugas BLU LPMUKP adalah melakukan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022.

Selanjutnya untuk mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP maka ditetapkan suatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang juga mengatur tentang tugas dan fungsi BLU LPMUKP sebagai Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tugas utama yaitu melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung tugas utama tersebut, LPMUKP diberikan dana kelolaan oleh Kementerian Keuangan sebagai stimulus dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat. Dana kelolaan pertama LPMUKP diterima pada bulan Oktober 2017 dengan jumlah Rp.500 Miliar, kemudian LPMUKP mendapat dana kelolaan tambahan sebesar Rp.850 Miliar di bulan Oktober Tahun 2018, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1,35 Triliun.

Tarif yang dikenakan dalam operasional penyaluran dana bergulir tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (**Tabel 2.1**):

Tabel 2.1. Tarif Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP

PROGRAM	URAIAN
<p>1. Pinjaman Dana Bergulir yang Berpendampingan (Pola Konvensional)</p>	<p>Program layanan BLU LPMUKP berupa pemberian pinjaman dana bergulir yang berpendampingan dari BLU LPMUKP kepada UMKM-KP dengan menggunakan pola konvensional yang disalurkan secara langsung atau melalui LKM-KP/LKB/LKBB sebagai <i>executing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat suku bunga dari BLU LPMUKP langsung ke UMKM-KP adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun. b. Tingkat suku bunga dari BLU LPMUKP kepada LKM-KP/LKB/LKBB adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun. c. Tingkat suku bunga dari LKM-KP/LKB/LKBB kepada UMKM-KP adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Paling tinggi 7% (tujuh persen) per tahun bagi UMKM-KP yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih rendah atau sama dibandingkan rata-rata IKK seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS); dan/atau 2) Paling tinggi $4\% + \left(\frac{IKK_i}{IKK_n}\right) \times 3\%$ per tahun bagi UMKM-KP yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKK seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS);
<p>2. Pembiayaan Dana Bergulir yang Berpendampingan (Pola Syariah)</p>	<p>Program layanan BLU LPMUKP berupa pemberian pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan dari LPMUKP kepada UMKM-KP dengan menggunakan pola syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sebagai <i>executing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara BLU LPMUKP dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. 2) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara BLU LPMUKP dengan LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. 3) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. b. Nisbah pembiayaan <i>musyarakah</i> (pembiayaan bersama bagi hasil) antara LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. c. Margin pembiayaan <i>murabahah</i> (pembiayaan jual beli) yang dikenakan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah kepada

PROGRAM	URAIAN
	<p>UMKM-KP persentase dari harga beli berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak;</p> <p>d. Nilai <i>ujroh</i> dalam pembiayaan <i>ijarah</i> (pembiayaan sewa) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP.</p> <p>e. Nilai <i>ujroh</i> dalam pembiayaan <i>ijarah mumtahiya bit-tamlik</i> (pembiayaan <i>leasing</i>) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP.</p> <p>f. Nilai <i>ujroh</i> biaya gadai dalam pembiayaan <i>rahn</i> (pembiayaan sistem gadai) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP</p> <p>g. Pola syariah lainnya yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP</p>
<p>3. Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir</p>	<p>Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir merupakan pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikenakan satu kali pada saat penandatanganan akad pembiayaan dana bergulir Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bentuk penggantian biaya provisi, administrasi, dan asuransi¹ yang timbul dari penandatanganan akad pembiayaan dana bergulir dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan dengan menggunakan pola konvensional atau syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank sebagai <i>executing</i>.</p> <p>Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir sebagaimana dimaksud terdiri atas:</p> <p>a. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>b. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>c. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>d. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola</p>

PROGRAM	URAIAN
	<p>Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p> <p>e. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p> <p>f. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p>

A. Rencana Anggaran

LPMUKP merencanakan terkait anggaran setiap tahunnya, rencana anggaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka penyaluran dana bergulir. Tahun 2022 BLU LPMUKP tidak menerima anggaran rupiah murni dari Bagian Anggaran KKP (BA 032 KKP). Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran, LPMUKP menggunakan anggaran yang bersumber dari proyeksi pendapatan PNBPN BLU sebesar Rp.48.793.272.000,00. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan yang berasal dari tarif bunga layanan serta provisi LPMUKP serta pengelolaan *idle cash* dari dana kelolaan yang tersedia.

Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target pengelolaan dana bergulir serta Indikator Kinerja yang diukur pada Tahun Anggaran 2022. Pada Indikator Kinerja yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan dana bergulir, LPMUKP memiliki IKU berupa realisasi PNBPN BLU, realisasi penyaluran dana bergulir, dan rasio dana bergulir diragukan tertagih. Sementara itu untuk Indikator Kinerja yang bersifat non layanan berupa modernisasi BLU, nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP, persentase penyelesaian temuan BPK, nilai kinerja anggaran LPMUKP, unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar, dan persentase realisasi anggaran LPMUKP.

Tabel 2.2 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Volume Satuan	Target (dalam Rp. ribu)
66056	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	IKU Program: 1. Persentase PNBP BLU 2. Persentase Penyaluran Dana Bergulir		
032.01.01	Program: Dukungan Manajemen		
6453	Kegiatan: Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	Indikator Kinerja Kegiatan: 1. Tersedianya Layanan Penyaluran Modal Usaha 2. Realisasi Pemanfaat Penerima Modal Usaha 3. Rasio Piutang Bermasalah Terhadap <i>Outstanding</i> Dana Bergulir		
6453.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	7.283	3.726.063
	Belanja Barang:	Pemanfaat	
	-RM		-
	-BLU		3.726.063
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	1.404.800
	Belanja Barang:	Layanan	
	-RM		-
	-BLU		1.404.800
6453.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	42.144.509
	Belanja Barang:	Layanan	
	-RM		-
	-BLU		42.144.509
	Belanja Modal:		
	-RM		-
	-BLU		100.000
6453.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	34	154.000
	Belanja Modal:	Unit	
	-RM		
	-BLU		154.000
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	996.200
	Belanja Barang:	Laporan	
	-RM		
	-BLU		996.200
TOTAL BELANJA LPMUKP			48.793.272

B. Target Kinerja Penyaluran

Pada tahun 2022 diharapkan LPMUKP mampu memenuhi target penyaluran dana bergulir sebesar Rp. 600 Miliar dari asumsi total dana kelolaan yang belum tersalurkan. Dari dana kelolaan tersebut, diharapkan mampu diserap dan disalurkan melalui Mitra UMKM-KP. Dampak langsung yang diharapkan dari penyaluran dana bergulir LPMUKP ini, selain dapat memperkuat permodalan bagi Koperasi/LKM dan UKM, juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar perikanan, usaha garam rakyat serta usaha masyarakat pesisir lainnya. Gambaran jumlah potensi KUKP tahun

2022 sesuai tipologi jenis kelompok usaha dan kebutuhan alokasi dananya dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3. Jumlah Potensi Target Pemanfaat Dana Bergulir LPMUKP

Jenis Kelompok Usaha	Jumlah Potensi Pelaku Usaha KP*	Realisasi Pemanfaat Sasaran LPMUKP 2021	Target Pemanfaat Sasaran LPMUKP 2022	Estimasi Rata-rata Alokasi per Pemanfaat** (Rp Ribu)	Total Kebutuhan Alokasi (Rp Juta)
Perikanan Tangkap	1.372.530	2.002	2.467	40.533	120.000
Budidaya Perikanan	1.634.597	2.734	3.040	98.677	360.000
Pengolah dan Pemasar	45.421	2.071	1.611	46.561	90.000
Usaha Garam Rakyat dan Usaha Masyarakat Pesisir	7.867	72	165	151.423	30.000
Total	3.060.415	6.888	7.283		600.000

(2) * Jumlah potensi pelaku usaha yang digunakan berdasarkan data dari Dashboard Kartu Pelaku Usaha (KUSUKA) KP

(3) **Nilai estimasi rata-rata alokasi per pemanfaat diperoleh berdasarkan data realisasi penyaluran per 31 Desember 2021

C. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada tahun 2022, diproyeksikan total pendapatan BLU LPMUKP yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran dana bergulir adalah sebesar Rp.48,79 Miliar. Proyeksi pendapatan tersebut merupakan total target pendapatan dana bergulir BLU. Rincian proyeksi pendapatan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.4. Proyeksi Pendapatan LPMUKP Tahun 2022

PENDAPATAN LPMUKP	TARGET
Penerimaan RM	-
Pendapatan Jasa Layanan (BLU)	48.793.272.000
1. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektor	25.163.581.000
2. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	16.317.190.000
3. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	7.312.500.000
4. Pendapatan Hibah BLU	-
5. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-
TOTAL	48.793.272.000

2.2. Perjanjian Kinerja

Setiap tahunnya BLU LPMUKP wajib menyusun dokumen *Key Performance Indicator* (KPI) yang berisi tentang target kinerja BLU LPMUKP dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Pembina Keuangan Badan Layanan Umum untuk dilakukan pembahasan terkait dengan target kinerja yang tertuang dalam dokumen usulan KPI dimaksud. Selain itu, LPMUKP juga menyusun perjanjian kinerja Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal dimana dalam perjanjian kinerja tersebut LPMUKP diberikan indikator kinerja khusus untuk menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik untuk dukungan manajemen.

Pada Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa penyesuaian target dalam perjanjian kinerja dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, penyesuaian tersebut berupa perubahan sasaran strategis yang menjadi sasaran kegiatan, kemudian indikator kinerja realisasi pemanfaat pinjaman dana bergulir LPMUKP dihilangkan dari perjanjian kinerja dikarenakan realisasi penyaluran dana bergulir sudah pasti memiliki jumlah pemanfaat, namun memang ragam penerima pinjaman dana bergulir menyebabkan jumlah pemanfaat bisa lebih banyak atau sedikit sementara trend realisasi penerima pinjaman setiap tahunnya memang relatif berbeda. Selain itu penyesuaian yang dilakukan adalah berupa penyesuaian pada beberapa target kinerja yang memang disepakati untuk naik dibandingkan dengan Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, Perjanjian Kinerja LPMUKP yang telah mengalami penyesuaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Kontrak Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2022

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBP Badan Layanan Umum (Rp.)	48.793.272.000
		2	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	600.000.000.000
		3	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 5
		4	Modernisasi BLU (%)	100
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP (Nilai)	91
		6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	81
		7	Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	88
		8	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2021 lingkup BLU LPMUKP (%)	100
		9	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	70
		10	Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	85

a. Realisasi PNBP BLU

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang dikelola oleh BLU, yang berasal dari pendapatan layanan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan, dan pendapatan non layanan yang diperoleh dari hasil optimalisasi/pemanfaatan surplus kas dan/atau dana kelolaan dalam investasi jangka pendek berisiko rendah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Realisasi PNBP BLU dihitung untuk PNBP yang disahkan ke Kuasa Bendahara Umum Negara.

b. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Realisasi penyaluran dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah atas dana kelolaan yang disalurkan sampai ke debitur (end user) selama tahun 2022 baik untuk penerima baru maupun penerima lama.

c. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan dan macet) dengan *outstanding* Piutang Dana Bergulir untuk penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 hingga tanggal 31 Desember 2022.

d. Modernisasi BLU

Modernisasi pengelolaan BLU adalah upaya penerapan teknologi informasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja BLU, yang antara lain mencakup pemanfaatan BIOS, penggunaan Aplikasi Persuratan, dan pengintegrasian basis data (database) dana bergulir dengan Sistem Informasi Kredit Program.

e. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

Nilai Rekonsiliasi Kinerja adalah Indikator Kinerja yang nilai diperoleh berdasarkan pemenuhan dokumen-dokumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

f. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di tetapkan sebagai tindaklanjut ditetapkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

g. Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup Sekretariat Jenderal dilakukan atas:

- (i) tingkat *sharing* dokumen mandatory;
- (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta
- (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP.

h. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2021 Lingkup BLU LPMUKP

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP merupakan suatu Indikator Kinerja yang nilainya diperoleh dari penyelesaian terhadap temuan-temuan oleh BPK pada Tahun 2021 dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai tindaklanjut terhadap temuan tersebut.

i. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d. 30 September 2022 atau Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

j. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP

Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran.

Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif.

BAB III

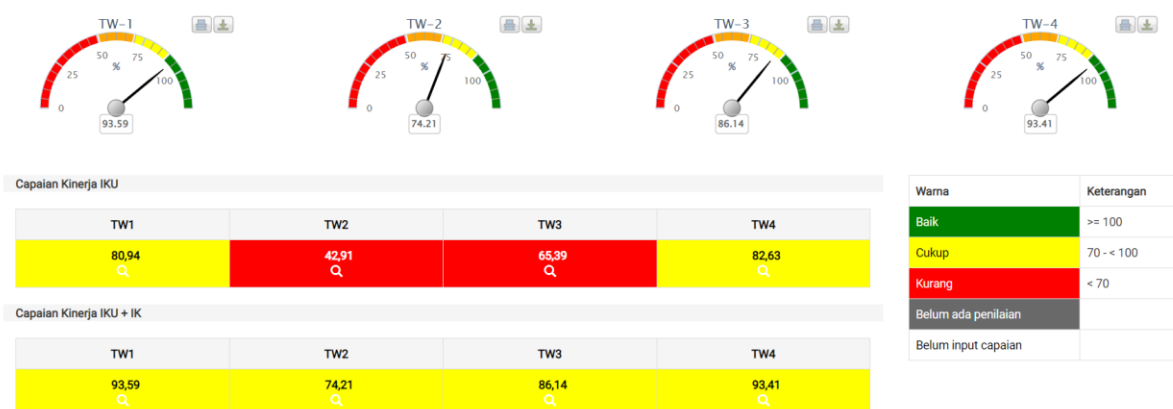
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja LPMUKP

3.1.1. Pencapaian Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik untuk Indikator Kinerja utama dengan periode pengukuran Triwulanan, Semesteran dan Tahunan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Utama dimaksud. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Kinerja dimaksudkan agar Lembaga dapat terus mengawasi/memonitoring pelaksanaan kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Proses pengelolaan kinerja LPMUKP menggunakan bantuan aplikasi kinerjaku yang dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id.

Analisis capaian kinerja LPMUKP pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dilakukan untuk menjabarkan realisasi pada setiap indikator kinerja utama, permasalahan, dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkup BLU LPMUKP. Analisis capaian kinerja tersebut juga disandingkan dan dibandingkan dengan capaian indikator kinerja pada Tahun Anggaran sebelumnya. Capaian perjanjian kinerja BLU LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2022 LPMUKP pada aplikasi kinerjaku

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2022

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBP Badan Layanan Umum (Rp.)	48,79 Miliar	43,58 Miliar	89,33
		2	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	600 Miliar	133,22 Miliar	22,20
		3	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 5	8,25	60
		4	Modernisasi BLU (%)	100	74,75	74,75
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP (Nilai)	92	89,16	96,91
		6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	81	80,19	99
		7	Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	88	98,44	111,86
		8	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2021 lingkup BLU LPMUKP (%)	100	100	100
		9	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	70	100	120
		10	Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	85	84,99	99,99

A. Realisasi PNBP BLU

Sesuai dengan yang tercantum pada dokumen kontrak kinerja antara BLU LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, target realisasi pendapatan PNBP BLU adalah sebesar Rp.48,79 miliar, pendapatan tersebut berasal dari:

- 1) Pendapatan jasa layanan perbankan BLU
- 2) Pendapatan tarif pembiayaan dana bergulir
- 3) Pendapatan provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dihitung berdasarkan realisasi pendapatan yang diperoleh dan dikelola BLU LPMUKP yang dihitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2022, yang kemudian diajukan pengesahannya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Capaian ini dihitung dengan polarisasi indikator kinerja *maximize* dimana semakin tinggi realisasi PNBP maka nilainya semakin baik. Realisasi PNBP tersebut dihitung menggunakan komposisi perhitungan dengan menambahkan pendapatan Jasa Layanan (Pendapatan tarif pembiayaan dana bergulir, pendapatan provisi dan administrasi) dan pendapatan Non Jasa Layanan (Pendapatan jasa layanan perbankan BLU). Sumber data yang digunakan untuk mengukur validitas capaian ini adalah menggunakan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Data SP3B untuk pengesahan PNP dalam aplikasi OM SPAN. Untuk lebih jelasnya, panduan perhitungan realisasi PNBP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target Realisasi PNBP BLU

No	Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Realisasi PNBP BLU	Rp.48 Miliar

Realisasi PNBP BLU = Realisasi Pendapatan Jasa Layanan + Realisasi Pendapatan Non Jasa Layanan

$$\text{Capaian Realisasi PNBP BLU} = \frac{\text{Realisasi PNBP BLU}}{\text{Target PNBP BLU}} \times 100\%$$

Realisasi pendapatan PNBP Tahun 2022 adalah sebesar Rp.43.587.077.302,00 yang terdiri dari hasil pendapatan jasa layanan sebesar Rp.22.042.310.061,00, selain itu BLU LPMUKP juga memperoleh pendapatan non jasa layanan sebesar Rp.21.544.767.241,00. Dengan demikian total pencapaian kinerja LPMUKP untuk realisasi PNBP BLU berdasarkan cara perhitungan dalam manual IKU adalah sebesar **89,33%**. Rincian target PNBP perbulan serta cara perhitungan realisasi PNBP sesuai dengan manual IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian PNBP BLU per Bulan

(Dalam Rp.000,-)

Bulan	Akun Pendapatan *					PNBP
	424911	424134	424139	424915	424919	
Januari	1.335.339	1.420.642	308.610			3.064.591
Februari	1.275.563	1.639.645	352.853			3.268.062
Maret	1.095.945	1.932.603	368.250			3.396.798
April	1.001.633	1.786.186	151.700		45.890	2.991.160
Mei	1.601.613	1.561.626	84.360			3.241.850
Juni	1.719.669	1.580.049	129.837			3.429.555
Juli	2.131.636	2.069.760	177.000	10.000		4.388.396
Agustus	1.842.787	1.673.368	24.990	26.808		3.567.954
September	2.136.989	1.697.973	149.100			3.984.062
Oktober	1.804.049	1.504.792	119.745			3.428.586
November	2.668.785	1.938.372	25.725	25.000		4.657.883
Desember	2.868.944	1.217.093	78.600		3.535	4.166.173
Total	21.482.959	20.022.113	1.970.771	61.808	49.425	43.587.077

- *) 424911 = Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
 424134 = Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
 424139 = Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
 424915 = Penerimaan Kembali Belanja BLU Tahun Anggaran yang Lalu
 424919 = Pendapatan lain-lain

$$\begin{aligned} \text{Realisasi PNBPN BLU} &= 22.042.310.061 + 21.544.767.241 \\ &= \mathbf{43.587.077.302} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi PNBPN BLU} &= \frac{43.587.077.302}{48.793.272.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{89,33\%} \end{aligned}$$

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat pengembalian pendapatan akibat pelimpahan penerimaan pendapatan tahun 2020 berupa pendapatan non jasa layanan yang pada akhirnya dikoreksi dan harus dikembalikan kepada mitra, sehingga hal tersebut tentunya berdampak pada pengurangan total pendapatan Tahun 2021. Pendapatan PNBPN semula sebelum adanya koreksi nilai adalah sebesar Rp.56 Miliar, namun setelah dilakukan koreksi terhadap pendapatan yang bersumber dari non jasa layanan menjadi Rp.43 Miliar.

Secara nominal, pendapatan PNBPN BLU pada Tahun 2021 relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan PNBPN BLU pada Tahun 2022, begitu pula dengan perbandingan capaian pada persentase PNBPN BLU pada Tahun 2022 relatif mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal tersebut diakibatkan pada Tahun Anggaran 2022 target PNBPN LPMUKP lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Perbandingan realisasi capaian tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian PNBPN

SK-1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat												
IKU-1		Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum (Rp.)												
		Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024			
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2022	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024		
3,6 Miliar	37 Miliar	71 Miliar	66 Miliar	56 Miliar	48 Miliar	43 Miliar	89,33	-0,02	48 Miliar	89,33	120 Miliar	36,36		

Berdasarkan data perhitungan capaian kinerja IKU realisasi PNBPN BLU, secara umum IKU tersebut telah tercapai dengan realisasi sebesar **Rp.43.587.077.302,00** nilai capaian sebesar **89,33%**, proporsi realisasi PNBPN BLU pada Tahun 2022 didominasi oleh pendapatan jasa layanan. Namun demikian, realisasi PNBPN BLU tersebut, belum dapat mencapai target yang telah disepakati.

Kendala yang dihadapi oleh LPMUKP pada pencapaian realisasi PNBP BLU Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi PNBP BLU selaras dengan jumlah *outstanding* penyaluran dana bergulir dan kesehatan pengembalian pinjaman dana bergulir berupa bunga pinjaman. Penyaluran dana bergulir sendiri tengah dilakukan evaluasi dan difokuskan untuk memproses dan menyelesaikan proposal yang telah diajukan oleh para pelaku usaha perikanan sebelum dilakukannya evaluasi proses bisnis LPMUKP. Sehingga hal tersebut berdampak pada jumlah penyaluran dana bergulir yang baru dan otomatis berdampak pula pada penerimaan bunga pinjaman yang relatif jumlahnya sama dengan penerimaan sebelumnya dikarenakan adanya pengembalian dana bergulir yang mengurangi jumlah *outstanding* pinjaman. Kemudian dampak dari jumlah penyaluran Tahun 2022 tersebut juga berdampak pada penerimaan jasa provisi BLU sehingga dari sisi pendapatan jasa layanan LPMUKP memperoleh jumlah yang kurang optimal;
- b) Sementara itu, pada Tahun 2022 juga sempat dilakukan koreksi atas bunga perbankan untuk instrumen investasi jangka pendek. Hal tersebut juga berdampak pada pendapatan non jasa layanan yang sebetulnya dapat menunjang realisasi PNBP pada saat tengah dilakukannya proses bisnis penyaluran dana bergulir dimaksud.

Selanjutnya, dalam rangka persiapan pencapaian target IKU Tahun 2023, dengan melihat history kinerja dan permasalahan yang dihadapi sepanjang Tahun 2022, LPMUKP akan melakukan beberapa hal berikut:

- a) Optimalisasi penyaluran dana bergulir melalui dukungan pembiayaan program prioritas KKP, sehingga dengan optimalisasi penyaluran tersebut diharapkan LPMUKP akan memperoleh pendapatan yang selaras dengan target yang disusun berdasarkan proyeksi *cashflow* keuangan LPMUKP Tahun 2023. Dari kegiatan penyaluran dana bergulir melalui dukungan pembiayaan program prioritas KKP, LPMUKP dapat menunjang target pendapatan jasa layanan;
- b) Selanjutnya, LPMUKP juga akan melaksanakan kegiatan *beauty contest* dalam rangka optimalisasi pendapatan non jasa layanan melalui penempatan dana kelolaan kepada mitra kerjasama bisnis LPMUKP yang memiliki *rate* terbaik.

B. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola dana bergulir BLU LPMUKP mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan penyediaan pembiayaan yang murah dan berpendampingan melalui pelayanan ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan

hususnya dalam peningkatan produksi dan kualitas dari usaha bidang kelautan dan perikanan. Dalam menterjemahkan tugas pokok ini maka penyaluran dana bergulir menjadi salah satu indikator utama untuk penilaian kinerja BLU LPMUKP. Pada tahun 2022 target kinerja realisasi penyaluran dana bergulir ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Target Penyaluran Dana Bergulir

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
2.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Realisasi penyaluran dana bergulir	Rp.600 Miliar

Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan serta menghitung total dana kelolaan yang belum tersalurkan hingga akhir Desember 2021. Dana kelolaan LPMUKP pada tahun 2017 sebesar Rp.600 Miliar, dan pada tahun 2018 LPMUKP mendapat tambahan dana kelolaan sebesar Rp.850 Miliar pada bulan Oktober. Kemudian hingga 31 Desember 2022 LPMUKP telah menyalurkan dana kelolaan sebesar Rp.1,005 Triliun.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, BLU LPMUKP telah menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.133.229.750.000,00 dengan pemanfaat penerima pinjaman sebesar 1.735 orang dan rata-rata pinjaman mencapai Rp.76.789.481,00 per orang. Perhitungan capaian realisasi penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Penyaluran DB} = \frac{\text{Realisasi Penyaluran DB}}{\text{Target Penyaluran DB}} \times 100\%$$

Realisasi penyaluran dana bergulir Tahun 2022, disalurkan kepada beberapa segmen usaha di sektor kelautan dan perikanan yang secara detail dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Per Sektor Usaha

Sektor Usaha	Realisasi (Rp.)	Pemanfaat (Orang)	Rata-rata /Orang
Perikanan Budidaya	72.537.750.000	894	81.138.422
Perikanan Tangkap	31.102.000.000	457	68.056.892
Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	27.855.000.000	353	78.909.348
Usaha Garam Rakyat	1.435.000.000	30	47.833.333
Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	300.000.000	1	300.000.000
TOTAL	133.229.750.000	1.735	76.789.481

Berdasarkan tabel tersebut, maka capaian realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2022 sesuai dengan perhitungan manual IKU, realisasi capaian IKU penyaluran dana bergulir adalah sebesar 22,20% dari target penyaluran dana bergulir Tahun 2022 sebesar Rp.600 Miliar.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi Penyaluran DB} &= \frac{133.229.750.000}{600.000.000.000} \times 100\% \\ &= 22,20\% \end{aligned}$$

Capaian IKU realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2022 adalah sebesar 22,20%. Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah capaian realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun 2021 yang hanya mencapai 45,09% dengan total penyaluran dana bergulir sebesar Rp.270 Miliar.

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

SK-1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat											
IKU-2		Realisasi Penyaluran Dana Bergulir											
Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2022	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
11 Miliar	215 Miliar	182 Miliar	192 Miliar	270 Miliar	600 Miliar	133 Miliar	22,20	-50,76	600 Miliar	22,20	1,4 Triliun	9,52	

Realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan secara optimal, akibatnya realisasi pada IKU penyaluran dana bergulir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi penyaluran dana bergulir hanya mencapai 22,20% dari target sebesar 80%, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi diantaranya:

- a) Pada Tahun Anggaran 2022, LPMUKP fokus dalam melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan penyaluran dan abergulir yang telah berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas serta layanan penyaluran pinjaman dana bergulir;
- b) Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan, LPMUKP melakukan perubahan proses bisnis penyaluran pinjaman. Selain itu, LPMUKP juga tengah berupaya agar penyaluran pinjaman dana bergulir yang dilakukan dapat bersinergi dalam mendukung program prioritas KKP, diantaranya Program Penangkapan Ikan Terukur serta Kampung Budidaya dan Revitalisasi Tambak;

- c) Perubahan proses bisnis serta kebijakan dukungan program prioritas KKP tersebut tentunya memerlukan penyesuaian regulasi berupa pengaturan internal serta upaya mitigasi risiko yang dilakukan;
- d) Selain itu, sepanjang Tahun Anggaran 2022 LPMUKP juga memproses dan menyelesaikan sebanyak 3.697 proposal pinjaman yang telah diterima dengan nilai potensi pinjaman sebesar Rp.1,37 Triliun bamuun selama ini belum dapat diproses; dan
- e) Dari sejumlah 3.697 proposal yang diproses tersebut, hanya 419 proposal yang dapat disetujui dengan nilai persetujuan sebesar Rp.168,3 Miliar. Rendahnya tingkat persetujuan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas proposal pinjaman yang diajukan.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan capaian IKU Realisasi Penyaluran Dana Bergulir pada Tahun Anggaran 2023, LPMUKP akan melaksanakan beberapa rencana aksi untuk mendorong penyaluran dana bergulir, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyelesaian regulasi dan pengaturan yang diperlukan baik terkait penyesuaian proses bisnis yang dilakukan maupun dukungan penyaluran pinjaman pada program prioritas KKP;
- b) Mendorong optimalisasi penyauran dana bergulir berupa dukungan pada program prioritas KKP dengan pendampingan model bisnis, manajemen bisnis dan teknologi;
- c) Melakukan perbaikan pola pelayanan agar semakin dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat; dan
- d) Memberikan pembekalan dalam rangka peningkatan kompetensi kepada tenaga pendamping dan pegawai BLU LPMUKP melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penyaluran dana bergulir untuk meningkatkan kualitas proposal pinjaman serta optimalisasi layanan penyaluran dana bergulir.





Gambar 3.2 Dokumentasi Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun 2022

C. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

LPMUKP mengemban misi di bidang ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui penguatan permodalan UMKM, dimana sasaran langsung (sebagian besar koperasi/LKM) dan tidak langsung/*end user* (sebagian besar anggota koperasi) dimungkinkan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, LPMUKP dalam menetapkan NPL mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kami memandang perlu adanya penetapan istilah NPL (*Non Performing Loan*) seperti lazimnya digunakan pada lembaga perbankan/lembaga keuangan untuk pengukuran kinerja pinjaman/pembiayaan bermasalah yang dilakukan. Untuk itu, LPMUKP mengusulkan dalam rangka mengukur kinerja pinjaman/pembiayaan, dilakukan melalui penetapan Kolektibilitas Dana Bergulir.
- 2) Kolektibilitas Dana Bergulir adalah pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan mitra dalam rangka mendapatkan informasi tentang kualitas pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir.
- 3) Pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan adalah penggolongan kualitas pengembalian pinjaman/pembiayaan dan/atau pembayaran Tarif/Imbal Jasa dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPMUKP dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan kondisi dari pinjaman/pembiayaan yang telah diberikan.
- 4) Pada Tahun 2022, LPMUKP menentukan perhitungan Kolektibilitas Dana Bergulir dalam bentuk klasifikasi piutang mulai dari Kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rasio Dana Bergulir Diragukan adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan, macet) dengan outstanding piutang dana bergulir untuk penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Tujuan dari perhitungan capaian IKU ini adalah untuk menjaga kualitas atau tingkat kesehatan pinjaman atas dana bergulir dengan polarisasi indikator kinerja Minimize (semakin rendah capaian semakin baik). Penilaian capaian kinerja rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.8. Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	RDBDT = 0%	150%
2	0% < RDBDT ≤ 1%	120%
3	1% ≤ RDBDT ≤ 2%	110%
4	2% ≤ RDBDT ≤ 5%	100%
5	5% ≤ RDBDT ≤ 8%	80%
6	8% ≤ RDBDT ≤ 12%	60%
7	RDBDT ≥ 12%	50%

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 131/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012, dirumuskan acuan sebagai berikut:

- 1) Perhitungan rasio *Non Performing* (NPF) adalah $\text{Pembiayaan (KL, D, M)} / \text{Total Pembayaran}$.
- 2) Pembiayaan (KL, D, M) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- 3) Peringkat Komposisi Bank yang dikategorikan secara umum sangat sehat dan secara umum sehat, adalah yang antara lain memnuhi rasio NPF kurang dari 5%.

Kemudian penentuan kualitas piutang didasarkan pada klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, sebagai berikut:

Tabel. 3.9. Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Klasifikasi	Keterangan	Penyisihan
Lancar	Untuk investasi tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	0,5%
Kurang Lancar	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	10%
Diragukan	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	50%
Macet	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 240 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.	100%

Tabel 3.10 Realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi*
3.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih	Maksimal 5 %	8,25 %

*Realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan data realisasi dari Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited

Berdasarkan hasil capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, realisasinya melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 5%. Dikarenakan pada IKU ini polarisasi yang diberlakukan adalah minimize maka secara realisasi, LPMUKP pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa kondisi internal dan eksternal LPMUKP utamanya dalam rangka pengelolaan dana bergulir LPMUKP pada Tahun Anggaran 2022 tengah berfokus pada penyiapan pola layanan penyaluran yang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dengan mendukung program prioritas KKP melalui dukungan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

SK-1					Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU-3					Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih								
Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
0%	0%	3,69%	3,01%	2,87%	5%	8,25%	60%	-40%	5%	60%	5%	60%	

Meningkatnya angka NPL pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa debitur yang mengalami masalah cash flow sebelum pandemi Covid-19 merebak. Setelah pandemi terjadi, arus kas debitur tersebut semakin terganggu dan berkembang menjadi kredit macet.

Selanjutnya ada beberapa kelompok yang gagal melakukan restrukturisasi pada akhir tahun 2022 sehingga berpotensi meningkatnya NPL. Selain, itu debitur yang sudah direstrukturisasi sebelumnya belum dapat memperbaiki kinerja keuangannya karena terdampak covid-19 dan sebagian besar debitur LPMUKP adalah nelayan dan pembudidaya yang secara langsung terdampak akibat tidak dapat memasarkan hasil produksi sehingga menekan keuntungan yang dapat diperoleh dalam usahanya yang secara langsung berdampak pada kemampuan dalam membayar angsuran.

Sejak tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022 terjadi serangan penyakit pada kegiatan budidaya udang vaname yang berakibat gagal panen hal ini terlihat dari 29% penyumbang angka NPL adalah dari sector budidaya udang vaname, hal ini juga diperparah dengan terjadinya bencana alam pada beberapa lokasi budidaya yang mengakibatkan kerusakan pada sarana budidaya.

Selain itu, menurunnya kemampuan mengasur debitur juga disebabkan meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan dari factor faktor produksi yang tidak diimbangi dengan perbaikan pada harga jual produksi sehingga menurunkan pendapatan dari debitur.

Terdapat beberapa debitur yang berisiko melakukan penundaan pembayaran angsuran yang apabila dinilai secara finansial memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran.

Strategi yang dilakukan oleh LPMUKP dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- 1) Melakukan analisa kredit berbasis risiko guna menyeleksi calon debitur yang dinilai sesuai ketentuan untuk menerima pinjaman tersebut;
- 2) Optimalisasi peran pendampingan guna memperbaiki kinerja keuangan dari debitur dan melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis yang membidangi guna mengatasi permasalahan teknis pada kegiatan usaha debitur;
- 3) Mengkaji system restrukturisasi yang tepat bagi debitur yang mengalami bencana sehingga dapat membagikan usaha debitur dan mengembalikan kemampuan untuk membayar angsuran;
- 4) Memaksimalkan upaya penagihan dan penyelesaian pinjaman bermasalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 5) Guna penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah yang dinilai sudah dalam kondisi tidak tertagih maka dilakukan pelipahan kepada PUPN.

D. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Good governance, actual, transparan dan akuntabel merupakan komponen yang ingin dicapai dalam sistem pemerintahan yang modern. Tuntutan terhadap efektifitas pelayanan publik menjadi dasar untuk BLU LPMUKP untuk melakukan modernisasi pengelolaan BLU untuk meningkatkan *performance* dalam pelayanan publik. Mengingat pentingnya modernisasi pengelolaan BLU maka kegiatan ini menjadi indikator utama kinerja lembaga BLU LPMUKP. Modernisasi Pengelolaan BLU dalam tahun 2022 adalah upaya untuk menerapkan teknologi informasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja, yang antara lain mencakup optimalisasi penggunaan BIOS, ketersediaan website sebagai sumber informasi, ketersediaan dashboard terkait dengan kegiatan penyaluran dana bergulir,

pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU, serta komponen modernisasi pengelolaan BLU lainnya selama kurun waktu 01 Januari s.d. 31 Desember 2022. Untuk itu ditetapkan target kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 3.12 Target Modernisasi Pengelolaan BLU

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
4.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100 %

Pembenahan terhadap sistem pendataan dan digitalisasi pelayanan baik penyediaan informasi maupun pengolahan data dan pelaporan merupakan sasaran dalam modernisasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi tentang ruang lingkup dan pelayanan publik yang disediakan oleh BLU LPMUKP.

Dalam perhitungan indikator kinerja utama ini digunakan formula persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2022 berdasarkan kelengkapan tahapan dan kecepatan penyelesaian tahapan modernisasi. Satuan pengukuran yang digunakan adalah persentase dengan konsolidasi periode berdasarkan catatan terakhir dengan polarisasi indikator *miximize* yaitu semakin tinggi capaian semakin baik dengan periode pelaporan satu tahun.

Dari perhitungan terhadap komponen penilaian kinerja diatas maka dapat disampaikan realisasi kinerja untuk indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Target Modernisasi Pengelolaan BLU

No	Uraian	Bobot	Capaian
1	Operasionalisasi BIOS	18,00%	18,00%
2	Penyediaan Website	10,00%	9,00%
3	Desain Sistem Informasi pada BLU yang Terintegrasi	12,00%	7,50%
4	Database terpusat/terintegrasi	22,00%	16,00%
5	Dashboard	18,00%	8,25%
6	SOP Pengelolaan IT	20,00%	16,00%
Total			74,75%

1) Operasionalisasi BIOS

BLU Integrated Online System (BIOS) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat PPK BLU dengan tujuan agar seluruh BLU di Indonesia dapat terintegrasi dengan satu sistem terutama terkait dengan data layanan, profil dan informasi BLU, serta data-data yang dinilai perlu disediakan oleh BLU serta proses pembinaan oleh PK BLU seluruhnya dilaksanakan melalui satu sistem yaitu dalam aplikasi BIOS yang berbasis web.

Dalam pencapaian variabel operasionalisasi aplikasi BIOS, LPMUKP telah melakukan pengisian terkait dengan data-data yang perlu diunggah ke dalam aplikasi BIOS tersebut. Data tersebut meliputi pengisian profil BLU, pengisian data layanan, pengelolaan data keuangan, pengelolaan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran, pengelolaan kinerja, Upload Dokumentasi, pengisian kertas kerja pembinaan atas hasil monev, pengisian pada modul dewan pengawas, pengisian modul *maturity rating*, pengelolaan Rencana Strategis Bisnis, pengelolaan tarif, dan pengelolaan remunerasi untuk pengajuan atau revisi remunerasi.

2) Penyediaan Website

Dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan LPMUKP kepada khalayak umum melalui pemanfaatan teknologi informasi, maka diperlukan adanya suatu media yang memuat terkait dengan layanan dan aktivitas LPMUKP. Ketersediaan website LPMUKP yang representatif menunjukkan bahwa aktivitas dan layanan LPMUKP dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir terus dilakukan secara terus menerus. Website LPMUKP dapat diakses melalui www.blulpmukp.id.

Website tersebut telah mengakomodir *performance* dan kemudahan akses, kemudahan navigasi. Selain itu, pada *website* tersebut juga menginformasikan terkait dengan profil BLU, layanan BLU, tarif layanan, sarana pengaduan, dan hasil survey layanan.

3) Desain Sistem Informasi pada BLU yang Terintegrasi

Dalam mewujudkan BLU yang modern, tentunya harus ada terkait dengan desain sistem informasi pada BLU yang terintegrasi. Pada LPMUKP terkait dengan desain sistem informasi yang tersedia saat ini adalah melakukan identifikasi seluruh proses bisnis yang memerlukan dukungan teknologi informasi, merencanakan sumber daya untuk mendukung pengembangan sistem, menyusun prioritas pengembangan sistem informasi, menyusun dokumen analisis sistem informasi terhadap seluruh proses bisnis yang telah dilakukan proses identifikasi, melakukan analisis rancangan input, proses dan output.

4) Database terpusat/terintegrasi

Selanjutnya, variabel penilaian pada IKU modernisasi BLU adalah Database terpusat/terintegrasi dengan melakukan proses integrasi intern sistem informasi keuangan berupa integrasi data penerimaan, integrasi data pengeluaran, integrasi data saldo rekening termasuk integrasi dengan sistem perbankan, integrasi data utang piutang, integrasi data investasi, integrasi data penganggaran. Kemudian LPMUKP juga melakukan proses integrasi intern sistem informasi layanan dengan integrasi sistem monitoring dan evaluasi data layanan, integrasi sistem pasca layanan. Selain itu, LPMUKP melakukan proses integrasi sistem informasi SDM

dengan integrasi data intern sdm, integrasi data sdm dengan sistem informasi keuangan.

5) *Dashboard*

Dashboard merupakan sebuah visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan suatu informasi yang berguna untuk suatu bisnis. Dalam pengelolaan BLU yang modern LPMUKP menyediakan beberapa dashboard berupa dashboard keuangan, dashboard layanan dan dashboard SDM.

6) SOP Pengelolaan IT

Dalam upaya peningkatan efektivitas kinerja serta pendayagunaan sistem yang telah ada, maka LPMUKP telah melakukan penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) sebagai tolak ukur pemanfaatan teknologi informasi yang ada di lingkup internal organisasi.

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU pada Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020 dengan penurunan sebesar -16,94%.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Modernisasi BLU

SK-1													
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BLU LPMUKP													
IKU-4													
Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU													
Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
100%	90%	60%	95%	97%	100%	74,75%	74,75	-16,94	100%	74,75	100%	74,75	

Kendala pada pencapaian IKU Modernisasi BLU adalah sebagai berikut:

- 1) Kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi LPMUKP yang dinilai belum memadai untuk implementasi modernisasi BLU secara optimal;
- 2) Praktisi atau SDM IT LPMUKP yang sangat terbatas sehingga berpengaruh pada implementasi modernisasi BLU. Dengan keterbatasan tersebut LPMUKP belum mampu mengakomodir seluruh variabel yang dipersyaratkan sebagai target yang harus dicapai dalam rangka modernisasi BLU Tahun 2022.

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Modernisasi BLU Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan infrastruktur Teknologi Informasi lingkup LPMUKP dengan mempedomani dokumen manual IKU modernisasi BLU agar persiapan yang

dilakukan sesuai dengan kebutuhan, serta tidak dibatasi untuk pengembangan lainnya;

- 2) Merekrut praktisi IT sebagai SDM BLU LPMUKP untuk mendukung pelaksanaan modernisasi BLU pada Tahun Anggaran 2023. Pada akhir Tahun 2022 LPMUKP sama sekali tidak memiliki SDM yang mengisi jabatan analis sistem informasi dan jabatan IT lainnya.

E. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

Dalam rangka mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkup LPMUKP, maka pada Tahun 2022 LPMUKP tetap menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana LPMUKP memiliki perjanjian kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Kinerja sebanyak 10 Indikator dengan 1 (Satu) sasaran kegiatan.

Nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan dokumen SAKIP dengan menilai beberapa aspek yaitu aspek kepatuhan, aspek kesesuaian, aspek ketercapaian serta aspek ketepatan. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun, target dari Indikator Kinerja ini adalah sebesar 92%.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 1047/SJ.1/RC.610/XII/2022 perihal Hasil Pertemuan Pengukuran Capaian Kinerja dan Rekonsiliasi Triwulan III Tahun 2022 Sekretariat Jenderal, capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP pada Tahun 2022 adalah **89,16%**, nilai tersebut diperoleh dari beberapa aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi kinerja dengan penilaian yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal KKP. Untuk lebih jelasnya skor aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Skor Aspek Penilaian Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

No	Unit Kerja	Nilai per Aspek				Rata-rata/ Total Skor (Nilai Max 100)
		Kepatuhan (Bobot 25%)	Kesesuaian (Bobot 25%)	Ketercapaian (Bobot 30%)	Ketepatan (Bobot 20%)	
Setjen						96,43
1	Biro Keuangan	25,00	25,00	27,50	20,00	97,50
2	Biro SDMAO	25,00	24,74	26,44	20,00	96,18
3	Biro Umum dan PBJ	25,00	24,80	27,39	20,00	97,19
4	Biro Humas dan KLN	25,00	25,00	26,54	20,00	96,54
5	Biro Perencanaan	25,00	24,74	28,54	20,00	98,28
6	Biro Hukum	25,00	25,00	29,45	20,00	99,45
7	LPMUKP	25,00	25,00	21,16	18,00	89,16
8	Pusdatin	25,00	25,00	24,33	20,00	94,33
9	BPISDKP	25,00	25,00	29,21	20,00	99,21

Total skor capaian yang diperoleh pada Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP adalah sebesar 89,16% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92%, maka capaian LPMUKP adalah sebesar **96,91%**.

$$\text{Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP} = \frac{89,16\%}{92\%} = 96,91\%$$

Kemudian, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 capaian kinerja nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP pada Tahun 2022 cenderung mengalami penurunan dengan nilai sebesar **-5,87%**. Perbandingan capaian kinerja nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP dapat dilihat pada **Tabel 3.16**.

Tabel 3.16 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BLU LPMUKP											
IKU-5		Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP											
Realisasi					2021				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2022	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	84,45	93,83	92	89,16	96,91	-4,98	92	96,91	95	93,85	

Kendala pencapaian nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP disebabkan oleh keterlambatan penyampaian Laporan Kinerja yang dikirimkan pada minggu ke – 4 Januari yang seharusnya paling lambat adalah minggu ke – 3 Januari 2021.

Selain itu, pada aspek ketercapaian, LPMUKP memperoleh nilai yang kurang optimal, yang dipengaruhi oleh capaian IKU dari Triwulan I hingga Triwulan III juga tidak mendapatkan capaian yang optimal.

Selanjutnya, LPMUKP pada Tahun Anggaran 2023, akan menepati pengiriman atau penyampaian Laporan Kinerja lingkup LPMUKP Tahun 2022 paling lambat munggi ke – 3 Januari Tahun 2023, serta melakukan upload ke aplikasi e-Sakip Reviu tepat waktu agar memperoleh capaian atas aspek ketepatan dengan nilai yang optimal.

Khusus permasalahan pada aspek pencapaian kinerja, LPMUKP akan melaksanakan kegiatan monitoring secara berkala dan lebih sering untuk mengantisipasi deviasi antara realisasi dan capaian, namun demikian, realisasi tersebut tetap ditentukan oleh performa dari unit yang bertanggungjawab atas IKU tersebut.

F. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPMUKP

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Penilaian kinerja anggaran berdasarkan diukur dengan mengukur beberapa aspek yaitu:

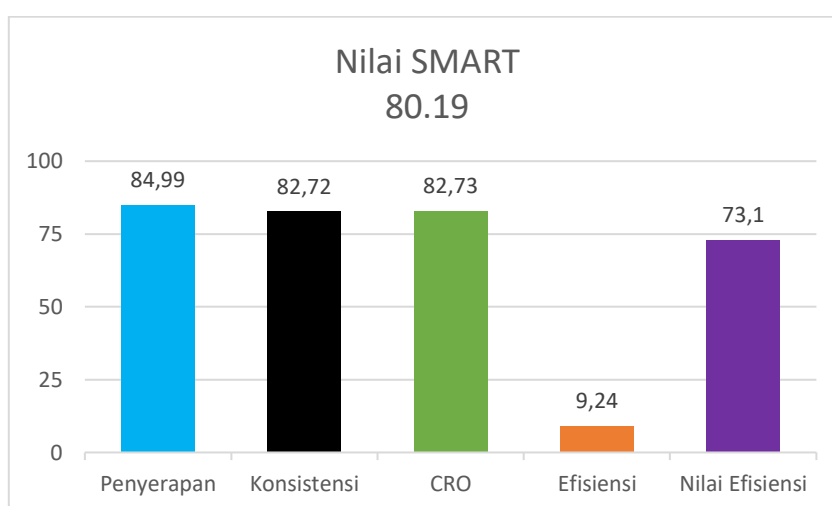
- **Aspek Implementasi** adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya;
- **Aspek Manfaat** adalah evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L;
- **Aspek Konteks** adalah evaluasi kinerja anggaran untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKAKL termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Pada Tahun 2022 target Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP adalah sebesar **81**, dengan periode pelaporan Tahunan dan polarisasi Maximize, dimana semakin besar realisasi capaian maka semakin besar nilai kinerja anggaran yang diperoleh.

Realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPMUKP pada Tahun 2022 diukur menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu dan disampaikan melalui Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 90/SJ.2/RC.610/I/2023 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Sekretariat Jenderal KKP Triwulan IV Tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar **80,19** yang dapat dijabarkan berdasarkan tabel 3.17 dan visualisasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Tabel 3.17 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal KKP

No	Kode Satker	Nama Satker	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	622081	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	84,44	99,11	91,65	100	0,49	51,22
2	660056	LPMUKP	80,19	84,99	82,72	82,73	9,24	73,1



Gambar 3.3 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART

Realisasi nilai SMART tersebut merupakan realisasi nilai kinerja anggaran LPMUKP, sehingga secara perhitungan, apabila realisas dibandingkan dengan target maka capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPMUKP adalah sebesar **99,00%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP} &= \frac{80,19}{81} \times 100\% \\ &= 99,00\% \end{aligned}$$

Capaian NKA pada Tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian NKA pada Tahun 2021. Kenaikan yang dialami LPMUKP pada realisasi capaian NKA adalah sebesar 3,54% dengan rincian perbandingan capaian yang dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BLU LPMUKP											
IKU-6		Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP											
Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2022	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	92,03	77,45	81	80,19	99,00	3,54	81	99,00	89	90,10	

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP adalah pencapaian terhadap Capaian Realisasi Output (CRO) dimana pada RO UMKM yang dilayani permodalan BLU (BDG.001) LPMUKP tidak dapat mencapai target volume output yang telah ditentukan sehingga otomatis berdampak pada nilai CRO juga terhadap nilai efisiensi, dimana realisasi anggaran yang cukup tinggi dan capaian output yang tidak optimal.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi capaian IKU NKA Tahun 2023, LPMUKP akan menyelaraskan antara penyerapan anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian output kinerja LPMUKP. Sehingga harapannya baik dari sisi penyerapan maupun sisi capaian output dapat terealisasi secara optimal dan berimbang, hal tersebut tentunya juga akan menunjang poin efisiensi jika capaian realisasi output mendapatkan capaian yang optimal.

G. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Dalam penilaian IKU ini terdapat beberapa aspek penilaian diantaranya:

- a) Dokumen, bobot 20% (Renstra, Manual IKU, PK es 1 dan 2, Laporan Kinerja)
- b) Keikutsertaan, bobot 10% (persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi bitrix)
- c) Keaktifan, bobot 70% (Upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H).

Target Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **88%**.

Tabel 3.19 Target Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
7.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP	88%

Kemudian berdasarkan memorandum Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi nomor 86/SJ.7/TU.210/I/2023 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Triwulan IV Tahun 2022, pada periode Tahun 2022 realisasi LPMUKP pada Indikator Kinerja ini mencapai **98,44%**, sehingga capaian realisasinya adalah sebesar **111,86%**.

Tabel 3.20 Capaian IKU MP lingkup Sekretariat Jenderal

No	Nama Eselon II	Nilai Target	Nilai Capaian Triwulan IV (%)*	Nilai Rata-rata TW I – TW IV (%)**
1	Biro Perencanaan	88,00	100	99,79
2	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	88,00	100	93,22
3	Biro Hukum	88,00	100	100
4	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	88,00	100	100
5	Biro Keuangan	88,00	100	100
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	88,00	98,44	97,22
7	Pusat Data, Statistik dan Informasi	88,00	100	100
8	LPMUKP	88,00	100	98,44

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Persentase MP} &= \frac{98,44\%}{88\%} \\
 &= 111,86\%
 \end{aligned}$$

Selanjutnya jika dibandingkan dengan Tahun 2021, capaian IKU MP pada Tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan sebesar **1,02%**. Untuk lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja MP

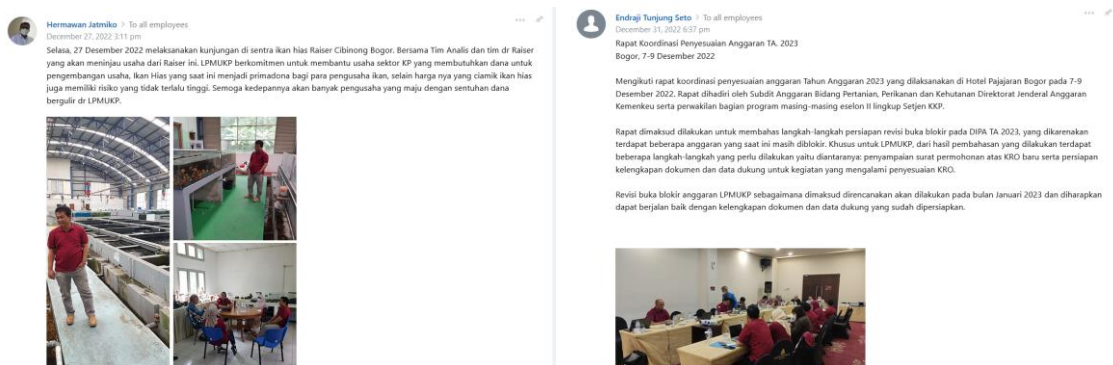
SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BLU LPMUKP											
IKU-7		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP											
Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2022	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	95,56	97,45	88	98,44	111,86	1,02	88	111,86	95	103,62	

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar merupakan hasil dari pemenuhan terhadap aspek-aspek yang dinilai pada IKU MP yaitu kelengkapan dokumen, keikutsertaan dan keaktifan. Salah satu langkah yang diterapkan untuk mengoptimalkan aspek keaktifan di lingkup LPMUKP adalah dengan memberikan himbauan setiap bulan pada para jajaran pimpinan LPMUKP yang ditugaskan untuk mengisi postingan pada aplikasi Bitrix. Himbauan tersebut dikirim melalui Whatsapp grup LPMUKP berupa rekapitulasi posting pada palikasi Bitrix KKP.

Selanjutnya, LPMUKP akan mempertahankan metodologi pencapaian IKU ini dengan menyesuaikan terhadap penilaian IKU MP yang baru.

Dengan metodologi tersebut, LPMUKP juga dapat melakukan efisiensi anggaran dikarenakan pada optimalisasi IKU tersebut, berita yang diinput atau diposting hanya merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran lain, sehingga tidak ada anggaran khusus yang digunakan untuk mendukung optimalisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP.





Gambar 3.4 Tampilan Posting pada Aplikasi Bitrix LPMUKP

H. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2021 Lingkup BLU LPMUKP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam Perjanjian Kinerja antara LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal KKP Tahun Anggaran 2022 salah satu Indikator Kinerja LPMUKP yang baru bagi LPMUKP adalah Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2021 Lingkup BLU LPMUKP dengan target capaian sebesar **100%**. Dengan adanya Indikator Kinerja ini maka LPMUKP harus berusaha untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK pada Tahun 2021.

Tabel 3.22 Target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2021 Lingkup BLU LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
8.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2021 Lingkup BLU LPMUKP	100%

Berdasarkan hasil perhitungan persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setjen yang tercantum dalam Memorandum Kepala Biro Keuangan kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor 2003/SJ.2/TRC.610/X/2022 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021” adalah **100%** sehingga capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar **100%**.

Tabel 3.23 Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat Jenderal

No.	Uit Kerja	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Penyelesaian (%)
1	Biro Perencanaan	0	0	<1	0,00	200
2	Biro SDMAO	0	0	<1	0,00	200
3	Biro Hukum	0	0	<1	0,00	200
4	Biro Humas dan KLN	0	0	<1	0,00	200
5	Biro Keuangan	0	0	<1	0,00	200
6	Biro Umum dan PBJ	320.201.513.571	0	<1	0,00	200
7	Pusdatin	0	0	<1	0,00	200
8	LPMUKP	49.729.163.766	0	<1	0,00	200
Jumlah		383.839.736.923	0	<1	0,00	200

Perbandingan capaian realisasi persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPMUKP cenderung sama, tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini disebabkan LPMUKP mampu untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK pada Tahun 2022 maupun Tahun 2021 sehingga capaiannya pun masih sama yaitu sebesar **100%**.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BLU LPMUKP											
IKU-8		Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP											
Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2022	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	100%	100%	100%	100%	100	0	100%	100	100%	100	

Pada Tahun Anggaran selanjutnya LPMUKP akan terus mempertahankan kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebagai bentuk kepatuhan terhadap tindak lanjut temuan pada saat dilakukannya pemeriksaan. Serta kedepannya LPMUKP juga akan terus mengupayakan terkait dengan temuan-temuan BPK RI untuk kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan.

I. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) baik bentuk surat maupun bab yang terbit pada Tahun 2021 s.d. Triwulan III

Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan.

Target Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP dengan polarisasi maximize dimana semakin tinggi nilai persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi maka capaian tersebut semakin baik.

Tabel 3.25 Target Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
9.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP	70%

Berdasarkan memorandum dari Kepala Biro Keuangan Nomor 70/SJ.2/RC.510/I/2023 perihal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen, LPMUKP terdapat 21 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dan tuntas, sehingga tidak ada sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka realisasi Indikator Kinerja ini adalah **100%**, sehingga nilai capaian pada IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP sesuai dengan aplikasi Kinerjaaku adalah sebesar **120%**.

Tabel 3.26 Rekap Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)
1	Biro Perencanaan	13	13	100,00
2	Biro Keuangan	22	22	100,00
3	Biro Umum dan PBJ	40	40	100,00
4	Biro Hukum	2	2	100,00
5	Biro SDMAO	20	19	95,00
6	Biro Humas dan KLN	12	10	83,33
7	Pusdatin	10	10	100,00
8	LPMUKP	21	21	100,00
Total		140	137	97,86

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 yang sebesar 100%, maka realisasi pada Tahun 2022 adalah sama yaitu sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya perbandingan IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

SK-1												
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BLU LPMUKP												
IKU-9												
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP												
Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024			
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2022	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	73	100	70	100	120	0	70	120	80	120

Keberhasilan dari pencapaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP adalah dengan melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, pemantauan tersebut dilaksanakan oleh tim Satuan Pengawas Intern LPMUKP yang aktif dalam mengkoordinasikan terkait dengan rekomendasi dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dalam hal ini SPI memiliki anggaran yang digunakan untuk mendukung pengawasan internal termasuk untuk mendukung pencapaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP yang dimuat pada RO Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Usaha KP.

J. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP

BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja operasional sebesar Rp.48.793.272.000,00 yang seluruhnya bersumber dari PNBP BLU baik penggunaan proyeksi PNBP Tahun Berjalan maupun penggunaan saldo kas BLU. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional dana bergulir LPMUKP sepanjang Tahun 2022.

Dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2022, LPMUKP termasuk ke dalam program Dukungan Manajemen (032.01) dengan kegiatan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (6453) dengan Empat Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu KRO Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (6453.BDG), KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan (6453.BIF), KRO Layanan Umum (6453.EAC) dan KRO Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (6453.FAE).

Periode pelaporan IKU ini adalah setiap Triwulan dengan polarisasi capaian *maximize* dimana semakin tinggi capaian maka semakin baik. Perhitungan capaian persentase realisasi anggaran BLU LPMUKP berdasarkan manual IKU Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

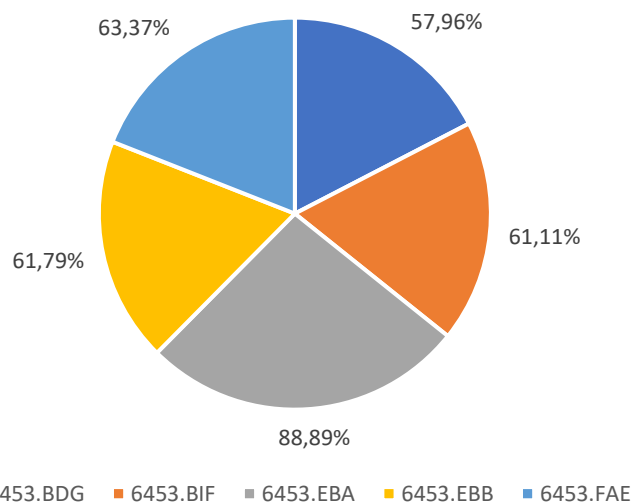
Capaian Persentase Realisasi Anggaran

$$= \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\% \right) / 85\%$$

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, BLU LPMUKP telah merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp.41.467.114.758,00 dari pagu anggaran total sebesar Rp.48.793.272.000,00 dalam rangka mendukung kegiatan penyaluran dana bergulir LPMUKP, berbeda dengan Tahun Anggaran 2021 dimana LPMUKP menggunakan saldo kas guna memenuhi kebutuhan operasional LPMUKP, pada Tahun 2022, LPMUKP menerapkan prinsip efisiensi anggaran agar tidak terjadi defisit anggaran atas belanja yang dilakukan sedangkan pendapatan LPMUKP tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan belanja tersebut, sehingga LPMUKP memberlakukan skala prioritas pada pelaksanaan belanja Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran LPMUKP berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran LPMUKP per 31 Desember 2022

Kode	Program/Aktivitas/ KRO/ RO/ Komponen/ Subkomp/ Detil	Jumlah Biaya	Realisasi	Persentase
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	48.793.272.000	41.467.114.758	84,99%
6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	48.793.272.000	41.467.114.758	84,99%
6453.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3.726.063.000	2.159.543.000	57,96%
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.404.800.000	858.468.100	61,11%
6453.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	42.244.509.000	37.552.953.618	88,89%
6453.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	154.000.000	95.159.640	61,79%
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.263.900.000	800.990.400	63,37%



Gambar 3.5 Persentase Realisasi Anggaran per KRO

Capaian realisasi anggaran LPMUKP secara total sesuai dengan perhitungan pada dokumen manual IKU adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Persentase Realisasi Anggaran} &= \left(\frac{41.467.114.758}{48.793.272.000} \times 100\% \right) / 85\% \\
 &= 84,99\% / 85\% \\
 &= 99,99\%
 \end{aligned}$$

Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 dengan realisasi anggaran sebesar **91,51%** maka realisasi anggaran pada Tahun 2022 cenderung mengalami penurunan dengan nilai persentase realisasi **84,99%**. Terjadi penurunan capaian pada Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP sebesar **7,12%**.

Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BLU LPMUKP											
IKU-10		Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP											
Realisasi					2022				Renstra LPMUKP 2020-2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2022	% Capaian thd Target 2022	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	75,74%	91,51%	85%	84,99%	99,99%	-7,12%	85%	99,99%	95%	89,46	

Kendala pada pencapaian persentase realisasi anggaran LPMUKP adalah ketersediaan anggaran LPMUKP yang seluruhnya menggunakan PNBP dari aktivitas pengelolaan dana baik penyaluran dana bergulir maupun penempatan dana kelolaan pada instrumen investasi jangka pendek. PNBP BLU hingga 31 Desember 2022 tidak terealisasi secara optimal, khususnya penerimaan bulan Desember baru dapat diterima seluruhnya setelah memasuki bulan Januari 2023, hal ini berdampak pada keputusan skala prioritas belanja LPMUKP yang harus menggunakan anggaran yang sudah tersedia untuk menghindari defisit anggaran dikarenakan LPMUKP tidak menggunakan saldo kas dalam rangka menyediakan anggaran untuk kebutuhan operasional LPMUKP sepenuhnya. Selain itu, LPMUKP juga menghindari terjadinya ketidak selarasan antara anggaran yang digunakan dan realisasi capaian output pada volume KRO yang telah disepakati.

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2023, dikarenakan LPMUKP juga dituntut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas pada pelaksanaan sosialisasi penyaluran dana bergulir Tahun 2023, maka LPMUKP untuk mengakomodir pelaksanaan

kegiatan tersebut rencananya akan menggunakan saldo kas BLU, selain untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan juga akan berdampak pada capaian realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2023.

3.2. Kinerja Keuangan

3.2.1. Pendapatan

Ralisasi pendapatan LPMUKP pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.43.587.077.302,00 dari target pendapatan PNBPN sebesar Rp.48.793.272.000,00 yang terdiri dari:

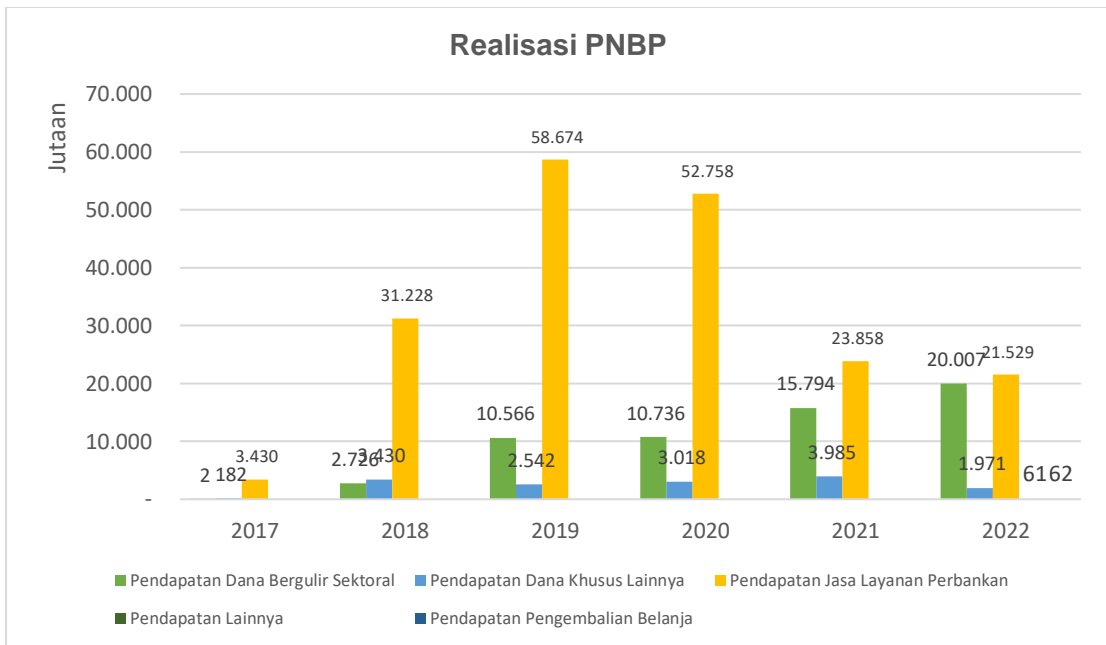
- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp.21.482.959.074,00
- Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp.20.022.113.193,00
- Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya sebesar Rp.1.970.771.250,00

Realisasi jumlah PNBPN BLU mengalami perubahan komposisi yang dominan dikarenakan pada Tahun 2022 komposisi pendapatan jasa layanan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan non jasa layanan. Hal tersebut menunjukkan hasil yang baik bagi kinerja PNBPN BLU dikarenakan pada Tahun sebelumnya PNBPN BLU didominasi oleh pendapatan non jasa layanan yang bersumber dari penempatan dana kelolaan pada instrumen investasi jangka pendek.

Selain itu, pada Tahun 2022, LPMUKP juga menerima pendapatan yang bersumber dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu atas pengembalian kelebihan pembayaran, serta pendapatan yang belum dapat didefinisikan dikarenakan permasalahan pada klasifikasi pembayaran melalui perbankan. Kendala tersebut dikarenakan LPMUKP masih menggunakan dua akun untuk penerimaan jasa layanan pengelolaan dana bergulir yaitu akun penerimaan bunga dan akun penerimaan provisi, sementara pada saat dilakukan pembayaran dan pengelolaan data hasil pembayaran terdapat beberapa transaksi yang tidak didefinisikan bahwa pembayaran tersebut berupa bunga atau provisi.

Namun demikian, pada Tahun 2022, LPMUKP belum dapat merealisasikan PNBPN sesuai dengan target dikarenakan pada Tahun 2022 LPMUKP memfokuskan untuk melakukan penyesuaian pola penyaluran dana bergulir dalam rangka mendukung program prioritas KKP melalui penyaluran dana bergulir dengan harapan LPMUKP dapat searah dengan kebijakan dan program prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedepannya, LPMUKP akan terus mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan memperkecil proporsi pendapatan non jasa layanan atas penempatan dana kelolaan BLU. Perkembangan pendapatan PNBPN lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut:

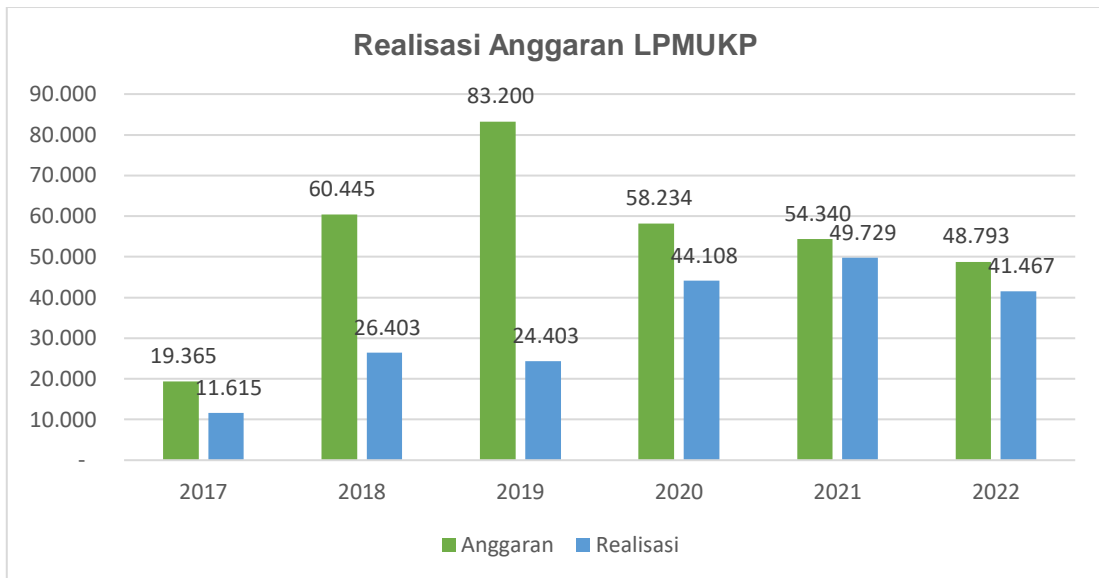


Gambar 3.6 Perkembangan Pendapatan PNBP BLU

3.2.2. Belanja Operasional

Pada Tahun 2022, pagu anggaran BLU LPMUKP berdasarkan surat bersama adalah sebesar Rp.48.793.272.000,00 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan PNBP hasil pengelolaan dana bergulir. Pelaksanaan anggaran LPMUKP pada Tahun 2022 mengedepankan skala prioritas penggunaan anggaran untuk menghindari adanya kemungkinan defisit anggaran, sebab pendapatan yang direalisasikan tidak dapat mengkomodir anggaran belanja yang berlebihan. Realisasi belanja pada BLU LPMUKP erat kaitannya dengan pendapatan BLU pada Tahun Anggaran tersebut, sejak Tahun 2020 LPMUKP tidak lagi menggunakan Rupiah Murni karena sudah harus berkembang dengan mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana bergulir baik dari layanan maupun non layanan.

Selanjutnya, penentuan anggaran belanja LPMUKP juga masih mengedepankan optimalisasi pendapatan yang diproyeksi akan diterima pada tahun anggaran berjalan. LPMUKP meminimalisir penggunaan saldo kas dalam rangka pemenuhan belanja operasional agar berpengaruh positif terhadap belanja operasional pendapatan operasional (BOPO) sehingga anggaran LPMUKP diharapkan masih dinilai efisien. Kemudian secara histori perkembangan anggaran belanja LPMUKP secara lengkap dapat dilihat pada **Gambar 3.7**.



Gambar 3.7. Perkembangan Anggaran dan Realisasi LPMUKP hingga Tahun 2022

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp.41,46 Miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp.48,79 Miliar sehingga realisasi anggaran yang digunakan dari total alokasi adalah 84,99% persen.

Perkembangan anggaran LPMUKP dari tahun ke tahun relatif fluktuatif, hal tersebut dipengaruhi komposisi anggaran LPMUKP yang semula mendapatkan alokasi Rupiah Murni pada Tahun 2017 hingga 2019 dan juga mengalokasikan PNBPN pada DIPA BLU, sehingga pada Tahun 2018 dan 2019 anggaran LPMUKP terlihat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran lainnya dimana mulai dari Tahun 2020 LPMUKP mencoba untuk menjadi mandiri dengan penggunaan anggaran belanja yang dialokasikan berdasarkan proyeksi pendapatan LPMUKP.

3.2.3. Surplus/Defisit

LPMUKP pada Tahun Anggaran 2022 mengalami surplus sebesar Rp.2.162.310.067,00 dari pendapatan PNBPN BLU sebesar Rp.43.629.424.825,00 dengan total realisasi anggaran belanja sebesar Rp.41.467.114.758,00. Realisasi anggaran tersebut lebih relatif berkurang jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pada Tahun sebelumnya. Hal ini juga dipengaruhi dari penerapan kebijakan efisiensi anggaran LPMUKP guna menghindari defisit anggaran antara pendapatan dan belanja.

3.2.4. Neraca LPMUKP Tahun 2022

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tahun 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan

sebesar Rp.1.404.793.042.828 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.102.764.598.439; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.3.135.161.174; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.714.577.682.061; dan Ekuitas sebesar Rp.54.588.772.554. Laporan Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.30**.

Tabel 3.30. Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH	
	2022	2021
1	2	3
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Lainnya dan Setara Kas	60.535.366	14.143.618.967
Kas pada Badan Layanan Umum	97.803.172.132	95.683.209.588
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	413.719.946
Piutang Bukan Pajak	17.421.929.458	10.315.261.906
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(12.525.998.517)	(6.443.766.131)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	4.895.930.941	3.871.495.775
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	(229.451)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	(229.451)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	45.890.252
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	45.890.252
Persediaan	4.960.000	10.230.000
JUMLAH ASET LANCAR	102.764.598.439	114.167.935.077
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Dana Bergulir	636.995.516.741	621.181.127.954
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(52.679.915.587)	(27.411.752.130)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	584.315.601.154	593.769.375.824
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	5.609.617.164	5.517.307.524
Aset Tetap Lainnya	1.982.110.376	1.982.110.376
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.456.566.366)	(3.514.924.449)
JUMLAH ASET TETAP	3.135.161.174	3.984.493.451
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	2.904.846.000	2.929.846.000
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	713.004.483.259	728.818.872.046
Aset Lainnya yang Belum Diregister	98.235.000	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1.429.882.198)	(1.072.355.167)
JUMLAH ASET LAINNYA	714.577.682.061	730.676.362.879
JUMLAH ASET	1.404.793.042.828	1.442.598.167.231

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH	
	2022	2021
1	2	3
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	60.535.366	14.143.618.967
Pendapatan Diterima Dimuka	143.734.908	331.771.183
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	204.270.274	14.475.390.150
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN	1.350.204.270.274	1.364.475.390.150
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	54.588.772.554	78.122.777.081
JUMLAH EKUITAS	54.588.772.554	78.122.777.081
JUMLAH EKUITAS	54.588.772.554	78.122.777.081
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.404.793.042.828	1.442.598.167.231

3.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2022

3.3.1. Penyusunan Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2022

Dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir, LPMUKP menyusun beberapa regulasi sebagai bentuk pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir pada Tahun 2022 guna mengatur kebijakan-kebijakan yang perlu diberlakukan, diantaranya:

Tabel 3.31 Daftar Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2022

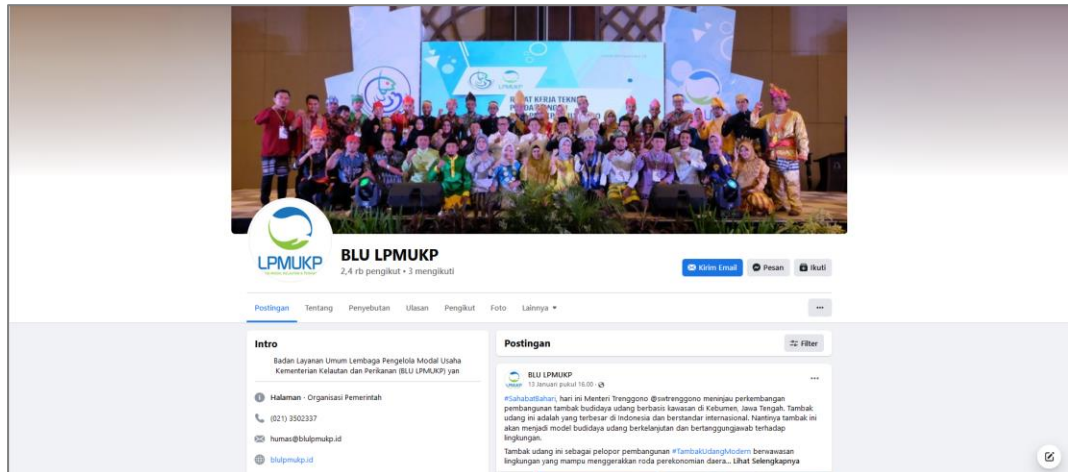
No	Tahun	Nomor Peraturan Direktur	Perihal
1	2022	1/PER-LPMUKP/2022	Pedoman Pengelolaan Tata naskah Dinas di Lingkungan LPMUKP
2	2022	2/PER-LPMUKP/2022	Juknis Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP
3	2022	3/PER-LPMUKP/2022	Disiplin Pegawai LPMUKP
4	2022	4/PER-LPMUKP/2022	Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Pegawai LPMUKP
5	2022	5/PER-LPMUKP/2022	Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP
6	2022	6/PER-LPMUKP/2022	Pedoman Pengelolaan Piutang
7	2022	7/PER-LPMUKP/2022	Pedoman Penempatan Dana LPMUKP
8	2022	8/PER-LPMUKP/2022	Pedoman Pengelolaan Jaminan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir;
9	2022	9/PER-LPMUKP/2022	Perubahan atas Peraturan Direktur LPMUKP Nomor 5/PER-LPMUKP/2022 Tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP;

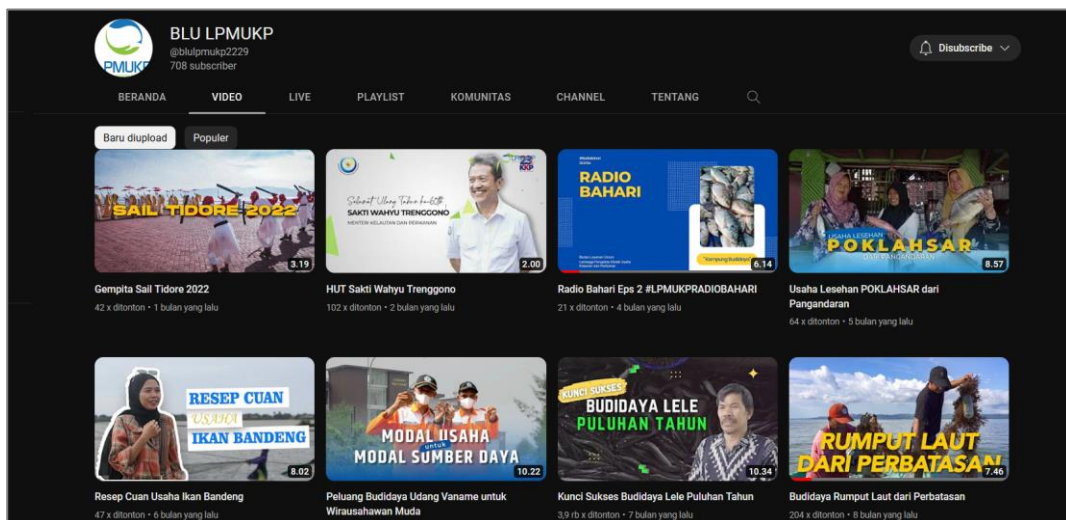
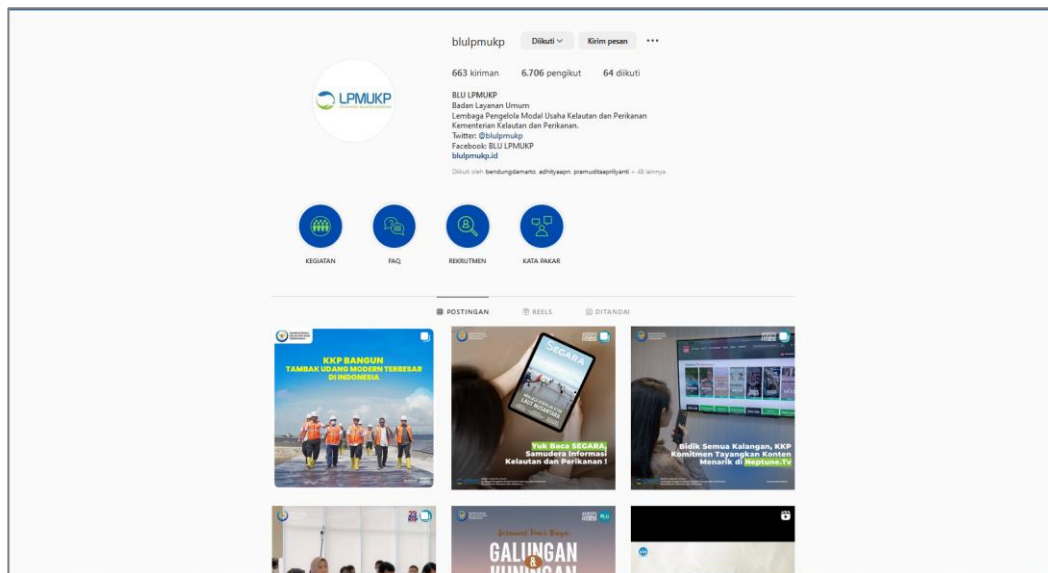
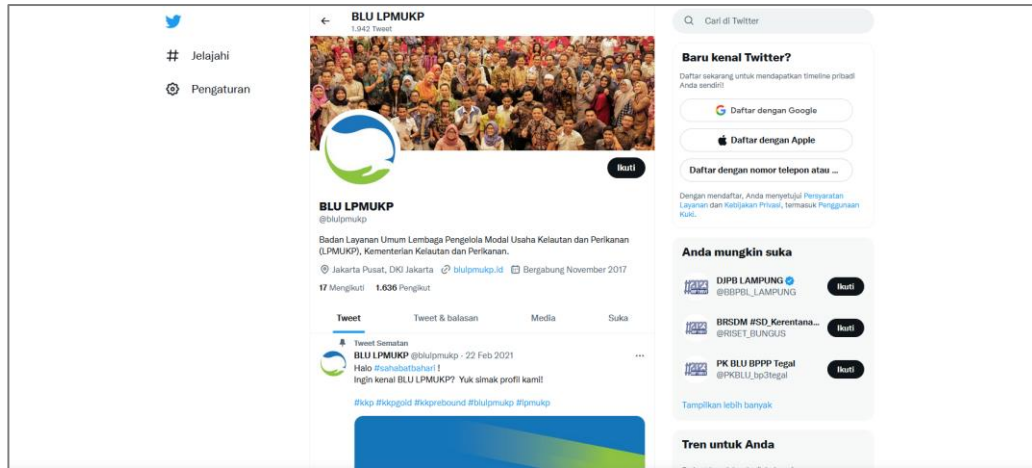
3.3.2. Publikasi BLU LPMUKP Tahun 2022

Sebagai salah satu upaya dalam memperkenalkan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang berfokus dengan kegiatan pembiayaan di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan tarif layanan yang murah serta mudah diakses, maka LPMUKP terus melaksanakan kegiatan publikasi melalui sosial media serta pemanfaatan internet sebagai media penyebaran yang digandrungi masyarakat di zaman sekarang. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh BLU LPMUKP dalam rangka memperkenalkan Lembaga kepada masyarakat:

1) Pembuatan akun sosial media

Pembuatan akun-akun sosial media digunakan sebagai salah satu Langkah LPMUKP dalam memuat informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan serta sebagai salah satu Langkah modernisasi BLU dalam penyampaian informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pembuatan media sosial juga ditujukan untuk mempromosikan layanan LPMUKP kepada publik agar dapat menumbuhkan kesadaran akan kehadiran LPMUKP sebagai salah satu lembaga yang memberikan solusi atas modal usaha khususnya di sektor Kelautan dan Perikanan. Media sosial yang digunakan diantaranya Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

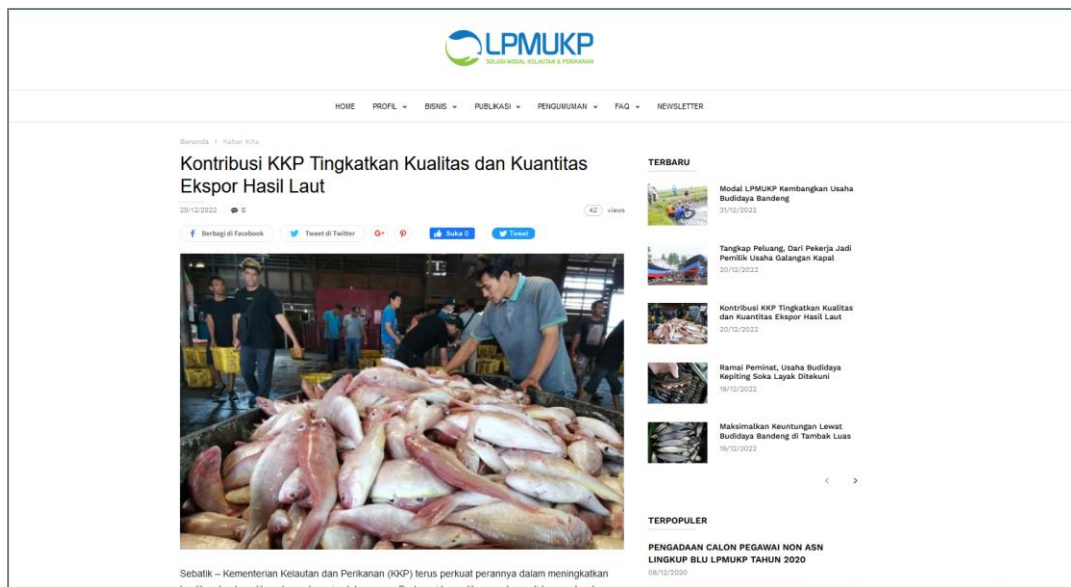
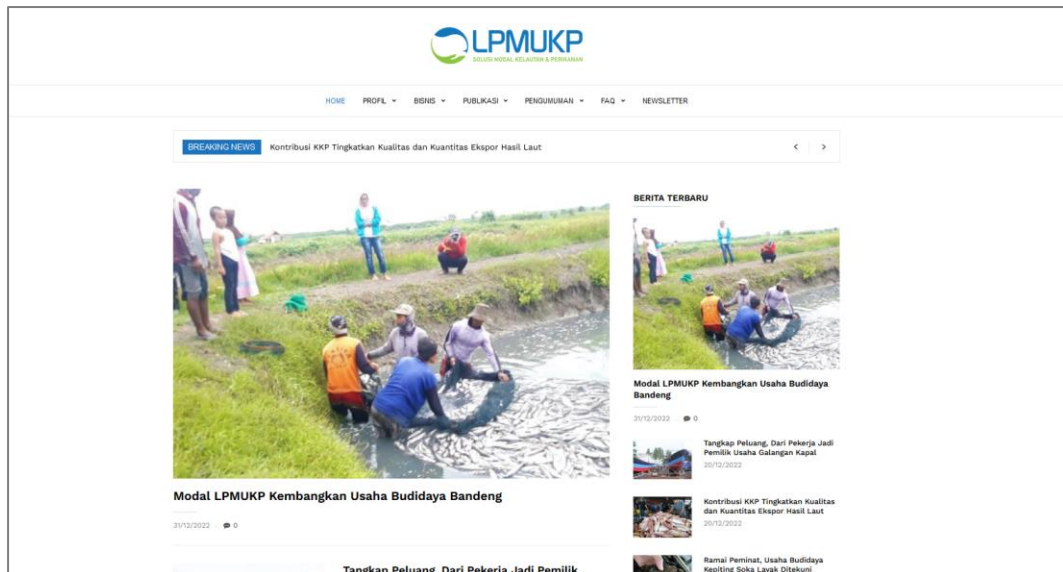




Gambar 3.8. BLU LPMUKP dalam Sosial Media

2) Website BLU LPMUKP

Pemanfaatan teknologi informasi dengan menyebarkan informasi terkait BLU melalui internet, selain pembuatan akun sosial media LPMUKP juga memiliki website yang berisikan informasi dan kegiatan aktual LPMUKP yang dapat diakses melalui <https://blulpmukp.id>.



Gambar 3.9. Tampilan Website LPMUKP

3) Pemberitaan BLU LPMUKP melalui media

Adapun pemberitaan terkait dengan BLU LPMUKP yang terus berinovasi dan mengembangkan inovasi layanan dalam menyalurkan modal usaha melalui kegiatan dana bergulir. Berikut merupakan pemberitaan terkait dengan BLU LPMUKP melalui media online:

Tabel 3.32 Pemberitaan BLU LPMUKP melalui Media Online

No	Tanggal	Link	Judul
1	12/20/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/20/12/2022/tangka-p-peluang-dari-pekerja-jadi-pemilik-usaha-galangan-kapal/	Tangkap Peluang, Dari Pekerja Jadi Pemilik Usaha Galangan Kapal
2	12/20/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/20/12/2022/kontribusi-kkp-tingkatkan-kualitas-dan-kuantitas-ekspor-hasil-laut/	Kontribusi KKP Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Ekspor Hasil Laut
3	12/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/12/2022/ramai-peminat-usaha-budidaya-kepiting-soka-layak-ditekuni/	Ramai Peminat, Usaha Budidaya Kepiting Soka Layak Ditekuni
4	12/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/12/2022/maksimal-keuntungan-lewat-budidaya-bandeng-di-tambak-luas/	Maksimalkan Keuntungan Lewat Budidaya Bandeng di Tambak Luas
5	12/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/12/2022/kkp-genjot-produktivitas-garam-nasional/	KKP Genjot Produktivitas Garam Nasional
6	12/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/12/2022/genjot-produksi-vaname-lpmukp-berikan-solusi-jitu-permodalan/	Genjot Produksi Vaname, LPMUKP Berikan Solusi Jitu Permodalan
7	12/18/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/12/2022/ikan-nila-jadi-andalan-budidaya-di-sulawesi-utara/	Ikan Nila Jadi Andalan Budidaya di Sulawesi Utara
8	12/16/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/16/12/2022/kaya-nutrisi-belut-sawah-jadi-pakan-pembesaran-kepiting/	Kaya Nutrisi, Belut Sawah Jadi Pakan Pembesaran Kepiting
9	12/15/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/15/12/2022/maksimal-budidayaan-nila-bisa-dongkrak-pasar-nasional/	Maksimal Budidayakan Nila Bisa Dongkrak Pasar Nasional
10	12/14/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/14/12/2022/optimalisasi-kualitas-pakan-budidaya-ikan/	Optimalisasi Kualitas Pakan Budidaya Ikan
11	12/13/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/12/2022/raih-untung-ganda-budidaya-dengan-teknik-polikultur/	Raih Untung Ganda Budidaya dengan Teknik Polikultur
12	12/12/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/12/12/2022/lpmukp-berdayakan-umkm-perikanan-tanah-air/	LPMUKP Berdayakan UMKM Perikanan Tanah Air
13	12/12/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/12/12/2022/lpmukp-dukung-modal-usaha-kampung-perikanan-budidaya/	LPMUKP Dukung Modal Usaha Kampung Perikanan Budidaya
14	12/9/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/09/12/2022/budidaya-rumput-laut-gerakan-roda-ekonomi-masyarakat/	Budidaya Rumput Laut Gerakan Roda Ekonomi Masyarakat
15	12/5/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/05/12/2022/dongkrak-perekonomian-masyarakat-lewat-budidaya-kepiting/	Dongkrak Perekonomian Masyarakat Lewat Budidaya Kepiting
16	12/1/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/01/12/2022/dari-tki-hingga-budidayaan-lobster-dalam-negeri/	Dari TKI Hingga Budidayakan Lobster Dalam Negeri
17	11/26/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/26/11/2022/permodalan-kkp-untuk-nelayan-maluku-utara/	Permodalan KKP untuk Nelayan Maluku Utara
18	11/26/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/25/11/2022/perempuan-tadui-sulap-rumput-laut-jadi-jajanan-lezat-kaya-gizi/	Perempuan Tadui Sulap Rumput Laut Jadi Jajanan Lezat Kaya Gizi
19	11/23/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/11/2022/optimalisasi-lahan-cara-pembudidayaan-emas-hijau-raih-keuntungan/	Optimalkan Lahan, Cara Pembudidayaan Emas Hijau Raih Keuntungan
20	11/22/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/22/11/2022/pakan-mandiri-tingkatkan-profit-budidaya-ikan-nila/	Pakan Mandiri Tingkatkan Profit Budidaya Ikan Nila
21	11/21/2022	https://www.jawapos.com/nasional/21/11/2022/kreatif-olahan-sidat-jadi-solusi-bangkit-dari-pandemi/	Kreatif! Olahan Sidat Jadi Solusi Bangkit dari Pandemi
22	11/17/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/17/11/2022/budidaya-ikan-gabus-haruan-tingkatkan-perekonomian/	Budidaya Ikan Gabus Haruan Tingkatkan Perekonomian

23	10/30/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/30/10/2022/peroleh-cuan-besar-dari-budidaya-gurami/	Peroleh Cuan Besar dari Budidaya Gurami
24	10/27/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/27/10/2022/pasca-pandemi-budidaya-bawal-bintang-di-bintan-kembali-bergairah/	Pasca Pandemi Budidaya Bawal Bintang di Bintan Kembali Bergairah
25	10/21/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/21/10/2022/raup-untung-dari-usaha-pembesaran-lobster/	Raup Untung dari Usaha Pembesaran Lobster
26	10/20/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/20/10/2022/panen-parsial-jadi-strategi-pembudidaya-jaga-stabilitas-harga/	Panen Parsial Jadi Strategi Pembudidaya Jaga Stabilitas Harga
27	10/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/10/2022/usaha-pembenihan-patin-untung-tinggi-asal-lakukan-perawatan-maksimal/	Usaha Pembenihan Patin Untung Tinggi Asal Lakukan Perawatan Maksimal
28	10/13/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/10/2022/budidaya-lele-jadikan-rawa-lebih-produktif/	Budidaya Lele Jadikan Rawa Lebih Produktif
29	10/12/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/12/10/2022/solusi-perlebar-margin-keuntungan-budidaya-dengan-pakan-mandiri/	Solusi Perlebar Margin Keuntungan Budidaya dengan Pakan Mandiri
30	10/11/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/11/10/2022/lebih-murah-kolam-tanah-masih-menjadi-pilihan-pembudidaya/	Lebih Murah, Kolam Tanah Masih Menjadi Pilihan Pembudidaya
31	10/10/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/10/10/2022/koperasi-perikanan-harapan-besar-kemajuan-usaha-penangkapan-ikan/	Koperasi Perikanan Harapan Besar Kemajuan Usaha Penangkapan Ikan
32	10/4/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/04/10/2022/melimpah-benih-gurami-pariaman-pasok-kebutuhan-di-berbagai-provinsi/	Melimpah, Benih Gurami Pariaman Pasok Kebutuhan di Berbagai Provinsi
33	03/10/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/03/10/2022/menilik-desa-tadui-surga-rumput-laut-dari-mamuju/	Menilik Desa Tadui, Surga Rumput Laut dari Mamuju
34	9/30/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/30/09/2022/ada-sentra-koi-di-ciseeng-bogor/	Ada Sentra Koi di Ciseeng Bogor
35	9/28/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/09/2022/pembenih-ikan-nila-jadi-profesi-utama-di-nagari-paninjauan-agam/	Pembenih Ikan Nila Jadi Profesi Utama di Nagari Paninjauan Agam
36	9/28/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/09/2022/mencicipi-gurihnya-usaha-kerupuk-ikan-gabus-di-kotawaringin-barat/	Mencicipi Gurihnya Usaha Kerupuk Ikan Gabus
37	9/27/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/27/09/2022/kampung-budidaya-bangkitkan-asa-budidaya-nila/	Kampung Budidaya Bangkitkan Asa Budidaya Nila
38	9/26/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/26/09/2022/potensial-dikembangkan-budidaya-bandeng-mudah-dan-minim-risiko/	Potensial Dikembangkan, Budidaya Bandeng Mudah dan Minim Risiko
39	9/22/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/22/09/2022/pola-mina-padi-naikkan-penghasilan-pembudidaya-ikan-dan-padi-di-sawah/	Tertarik Budidaya Ikan dengan Mina Padi? Begini Caranya
40	9/20/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/20/09/2022/lebih-menguntungkan-tilapia-salin-jadi-fokus-budidaya/	Lebih Menguntungkan, Nila Salin Jadi Fokus Budidaya
41	9/17/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/17/09/2022/fermentasi-pakan-kurangi-biaya-budidaya-dan-buat-ikan-cepat-besar/	Fermentasi Pakan, Kurangi Biaya Budidaya dan Buat Ikan Cepat Besar
42	9/16/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/16/09/2022/dobel-untung-toraja-kembangkan-sistem-budidaya-mina-padi/	Dobel Untung, Toraja Kembangkan Sistem Budidaya Mina Padi
43	9/15/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/15/09/2022/jadi-bahan-baku-pupuk-organik-rumput-laut-buleleng-sampai-ke-india/	Jadi Bahan Baku Pupuk Organik, Rumput Laut Buleleng Sampai ke India
44	9/13/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/09/2022/dampak-berganda-budidaya-rumput-laut-di-nunukan/	Dampak Berganda Budidaya Rumput Laut di Nunukan
45	9/10/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/10/09/2022/cepat-untung-usaha-pembenihan-lele-banyak-diminati/	Cepat Untung, Usaha Pembenihan Lele Banyak Diminati

46	9/9/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/09/09/2022/tinggi-peminat-kepiting-soka-dari-langkat-jadi-andalan-ekspor/	Tinggi Peminat, Kepiting Soka dari Langkat Jadi Andalan Ekspor
47	9/8/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/08/09/2022/pokdakan-jadi-kunci-tumbuhkan-produksi-rumput-laut-lingga/	Pokdakan Jadi Kunci Tumbuhkan Produksi Rumput Laut Lingga
48	9/7/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/07/09/2022/modal-murah-nila-salin-jadi-unggulan-budidaya-air-payau/	Modal Murah, Nila Salin Jadi Unggulan Budidaya Air Payau
49	9/6/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/06/09/2022/kunci-pesatnya-budidaya-kerapu-di-probolinggo/	Kunci Pesatnya Budidaya Kerapu di Probolinggo
50	9/2/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/02/09/2022/potensi-kemajuan-ekonomi-melalui-sistim-syariah/	Potensi Kemajuan Ekonomi Melalui Sistim Syariah
51	9/1/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/01/09/2022/penting-benih-jadi-modal-utama-budi-daya-kakap-putih/	Penting! Benih Jadi Modal Utama Budidaya Kakap Putih
52	8/23/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/08/2022/kud-mino-saroyo-cilacap-luncurkan-kapal-penangkap-ikan-30gt/	KUD Mino Saroyo Cilacap Luncurkan Kapal Penangkap Ikan 30GT
53	8/8/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/08/08/2022/arwana-super-red-ikan-langka-dengan-harga-fantastis/	Arwana Super Red, Ikan Langka dengan Harga Fantastis
54	8/4/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/04/08/2022/gurami-blitar-kembali-bergairah-usai-dihantam-pandemi/	Gurami Blitar Kembali Bergairah Usai Dihantam Pandemi
55	7/28/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/07/2022/budidaya-ikan-hias-tetra-peluang-bisnis-komoditas-ekspor/	Budidaya Ikan Hias Tetra, Peluang Bisnis Komoditas Ekspor
56	7/23/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/07/2022/anambas-suguhkan-potensi-budidaya-kerapu/	Anambas Suguhkan Potensi Budidaya Kerapu
57	7/20/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/20/07/2022/kemilau-usaha-tiram-mutiara-dari-sumba/	Kemilau Usaha Tiram Mutiara dari Sumba
58	7/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/07/2022/nila-jadi-unggulan-kkp-bentuk-kampung-budidaya-di-minahasa-utara/	Nila Jadi Unggulan, KKP Bentuk Kampung Budidaya di Minahasa Utara
59	7/16/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/16/07/2022/harga-tinggi-budidaya-ikan-papuyu-kian-diminati/	Harga Tinggi, Budidaya Ikan Papuyu Kian Diminati
60	7/15/2022	https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/15/07/2022/mengenal-budidaya-showa-ikan-koi-incaran-pecinta-ikan-hias/	Mengenal Budidaya Showa, Ikan Koi Incaran Pecinta Ikan Hias
61	7/14/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/14/07/2022/brebes-punya-kampung-perikanan-budidaya-bandeng/	Brebes Punya Kampung Perikanan Budidaya Bandeng
62	7/13/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/07/2022/teripang-komoditas-andalan-dari-timur-indonesia/	Teripang, Komoditas Andalan dari Timur Indonesia
63	7/12/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/12/07/2022/raup-untung-dari-ikan-baung/	Raup Untung dari Ikan Baung
64	7/12/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/12/07/2022/menjanjikan-kkp-genjot-produksi-kakap-putih-di-meranti/	Menjanjikan, KKP Genjot Produksi Kakap Putih di Meranti
65	7/11/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/11/07/2022/potensi-melimpah-sarongan-jadi-lokasi-pengembangan-lobster/	Potensi Melimpah, Sarongan Jadi Lokasi Pengembangan Lobster
66	7/11/2022	https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2022/budidaya-bawal-bintang-jadi-fokus-kkp-dukung-komoditas-perikanan-bima/	Budidaya Bawal Bintang Jadi Fokus KKP Dukung Komoditas Perikanan Bima
67	7/9/2022	https://www.jawapos.com/nasional/08/07/2022/kkp-tingkatkan-budidaya-rumput-laut-di-sumba-timur/	KKP Tingkatkan Budidaya Rumput Laut di Sumba Timur
68	7/6/2022	https://www.jawapos.com/nasional/06/07/2022/kkp-akselerasi-kampung-budidaya-kepiting/	KKP Akselerasi Kampung Budidaya Kepiting
69	6/30/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/30/06/2022/penangkapan-terukur-angin-segar-bagi-nelayan-lokal-halmahera-utara/	Penangkapan Terukur, Angin Segar Bagi Nelayan Lokal Halmahera Utara

70	6/29/2022	https://www.jawapos.com/nasional/29/06/2022/lpmukp-dukung-bpr-plb-giatkan-literasi-keuangan-masyarakat-pesisir/	LPMUKP Dukung BPR PLB Giatkan Literasi Keuangan Masyarakat Pesisir
71	6/29/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/06/2022/gemar-makan-ikan-dengan-pindang-lombok-barat/	Gemar Makan Ikan dengan Pindang Lombok Barat
72	6/23/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/06/2022/modal-blu-kkp-untuk-koperasi-nelayan/	Modal BLU KKP untuk Koperasi Nelayan
73	6/22/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/22/06/2022/lpmukp-dukung-permodalan-usaha-transportasi-laut-di-halmahera-utara/	Ojek Laut Tulang Punggung Ekonomi di Halmahera Utara
74	6/21/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/21/06/2022/modal-lpmukp-dukung-program-pemberdayaan-untuk-reforma-agraria/	Modal LPMUKP Dukung Program Pemberdayaan untuk Reforma Agraria
75	5/25/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/25/05/2022/pendampingan-nuril-untuk-pelaku-usaha-kelautan-perikanan-probolinggo/	Pendampingan Nuril untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Probolinggo
76	5/23/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/05/2022/upaya-poltek-kp-pangandaran-lahirkan-pengusaha-muda/	Praktik Budidaya Udang Vaname di Poltek KP, Upaya Lahirkan Wirausahawan Muda
77	5/20/2022	https://www.jawapos.com/nasional/20/05/2022/usaha-kelautan-dan-perikanan-ini-cara-peroleh-modal-lpmukp/	Usaha Kelautan dan Perikanan, Ini Cara Peroleh Modal LPMUKP
78	5/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/05/2022/kisah-oki-pendamping-perempuan-inspiratif-dari-lpmukp/	Kisah Oki Pendamping Perempuan Inspiratif dari LPMUKP
79	5/18/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/18/05/2022/migrasi-suratman-kembangkan-nila-keramba-di-manokwari/	Migrasi, Suratman Kembangkan Nila Keramba di Manokwari
80	5/17/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/17/05/2022/pendamping-lpmukp-berdayakan-masyarakat-kelautan-perikanan/	Pendamping LPMUKP Berdayakan Masyarakat Kelautan Perikanan
81	5/12/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/12/05/2022/dibalik-kesuksesan-menjalankan-tugas-pendampingan/	Dibalik Kesuksesan Menjalankan Tugas Pendampingan
82	5/11/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/11/05/2022/lpmukp-bangkitkan-usaha-perikanan-dan-kelautan-di-gorontalo/	LPMUKP Bangkitkan Usaha Perikanan dan Kelautan di Gorontalo
83	4/28/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/04/2022/dengan-sistem-jemput-bola-bmt-gunung-jati-bantu-umkm/	Dengan Sistem Jemput Bola, BMT Gunung Jati Bantu UMKM
84	4/27/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/27/04/2022/dari-nelayan-jadi-pemasar-ikan-sukses/	Dari Nelayan Jadi Pemasar Ikan Sukses
85	4/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/04/2022/kunci-sukses-budidaya-lele-puluhan-tahun/	Kunci Sukses Budidaya Lele Puluhan Tahun
86	4/15/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/15/04/2022/sukses-budidaya-bersama-pokdakan-cijambe/	Sukses Budidaya Bersama Pokdakan Cijambe
87	4/14/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/14/04/2022/budaya-organisasi-modal-penting-kembangkan-koperasi/	Budaya Organisasi, Modal Penting Kembangkan Koperasi
88	4/13/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/04/2022/pulang-kampung-gunawan-kembangkan-udang-supra-intensif/	Pulang Kampung, Gunawan Kembangkan Udang Supra Intensif
89	4/11/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/11/04/2022/cintai-udang-layaknya-keluarga/	Cintai Udang Layaknya Keluarga
90	4/8/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/08/04/2022/bazar-ramadan-jadi-ajang-promosi-rumah-abon/	Bazar Ramadhan Jadi Ajang Promosi Rumah Abon
91	4/8/2022	https://www.jawapos.com/nasional/08/04/2022/modal-terpenuhi-nelayan-paciran-tak-lagi-sulit-melaut/	Modal Terpenuhi, Nelayan Paciran Tak Lagi Sulit Melaut
92	4/6/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/06/04/2022/jiwa-muda-kppl-ngupaya-mina/	Jiwa Muda KPPL Ngupaya Mina
93	4/6/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/06/04/2022/bustamin-maksimalkan-usaha-surga-rajungan/	Bustamin Maksimalikan Usaha Surga Rajungan

94	3/19/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/03/2022/nelayan-tangkap-dan-pembudidaya-udang-di-sumbawa-peroleh-modal-usaha/	Nelayan Tangkap dan Pembudidaya Udang di Sumbawa Peroleh Modal Usaha
95	3/17/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/18/03/2022/blu-lpmukp-dukung-program-program-kkp-termasuk-sistem-resi-gudang/	LPMUKP Dukung Program-Program KKP, termasuk Sistem Resi Gudang
96	3/17/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/18/03/2022/sidat-cilacap-sampai-ke-jepang/	Sidat Cilacap Sampai ke Jepang
97	3/13/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/03/2022/lpmukp-bantu-berdayakan-umkm-bandeng-presto-di-karawang/	LPMUKP Bantu Berdayakan UMKM Bandeng Presto di Karawang
98	3/11/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/11/03/2022/sertijab-direktur-lpmukp-jadi-momen-penyegaran-dan-peningkatan-layanan/	Serah Terima Jabatan Direktur LPMUKP jadi Momen Penyegaran dan Peningkatan Layanan
99	3/4/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/04/03/2022/menteri-trenggono-lantik-direktur-baru-blu-lpmukp/	Menteri Trenggono Lantik Direktur Baru BLU LPMUKP
100	2/28/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/02/2022/pemanfaatan-lahan-garam-jadi-budidaya-ikan-dan-udang-bawa-berkah/	Pemanfaatan Lahan Garam Jadi Budidaya Ikan dan Udang Bawa Berkah
101	2/28/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/02/2022/banyak-anak-muda-melaut-modal-bagi-nelayan-perlu-disiapkan/	Banyak Anak Muda Melaut, Modal Bagi Nelayan Perlu Disiapkan
102	2/26/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/26/02/2022/lpmukp-kementerian-kelautan-dan-perikanan-dukung-pengembangan-natuna/	LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Siap Dukung Pengembangan Natuna
103	2/17/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/18/02/2022/lpmukp-optimalisasi-pendampingan-program-kampung-perikanan-budidaya/	LPMUKP Optimalisasi Pendampingan Program Kampung Perikanan Budidaya
104	2/16/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/17/02/2022/paguyuban-pembudidaya-ikan-di-sragen-dapatkan-tawaran-permodalan-usaha/	Paguyuban Pembudidaya Ikan di Sragen Dapatkan Tawaran Permodalan Usaha
105	1/31/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/31/01/2022/modal-gemar-ikan-anca-ajak-milenial-bombana-berbagi-masa-depan/	Modal Gemar Ikan, Anca Ajak Milenial Bombana Berbagi Masa Depan
106	1/31/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/31/01/2022/budidaya-mandiri-hingga-ekspor-udang-hias-ke-berbagai-negara/	Mitra Aquatic, Budidaya Mandiri Hingga Ekspor Udang Hias ke Berbagai Negara
107	1/30/2022	https://www.jawapos.com/nasional/30/01/2022/kick-off-bulancintalaut-lpmukp-ambil-bagian/	Kick Off #BulanCintaLaut, LPMUKP Ambil Bagian
108	1/28/2022	https://www.jawapos.com/ekonomi/29/01/2022/permodalan-lpmukp-dukung-budidaya-lele-di-boyolali/	Permodalan LPMUKP Dukung Budidaya Lele di Boyolali

3.3.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2022

1) Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal usaha KP

Pada Tahun 2022 LPMUKP telah menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran, kegiatan tersebut meliputi kegiatan operasional dan non operasional yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir pada Tahun Anggaran 2022.

Pengelolaan Modal Usaha KP merupakan kegiatan utama BLU LPMUKP yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang seluruhnya bersumber dari PNBP BLU. Adapun Klasifikasi Rincian Output yang digunakan pada kegiatan pengelolaan modal usaha KP adalah Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (6453.BDG), Pengawasan

dan Pengendalian Layanan (6453.BIF), Layanan Dukungan Manajemen Internal (6453.EBA), Layanan Saranan dan Prasarana Internal (EBB), Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (6453.FAE). Realisasi kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2022 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.31**.

Tabel 3.33 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2022

Kode	Program/Aktivitas/ KRO/ RO/ Komponen/ Subkomp/ Detil	Jumlah Biaya	Realisasi	%
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	48.793.272.000	41.467.114.758	84,99%
6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	48.793.272.000	41.467.114.758	84,99%
6453.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3.726.063.000	2.159.543.000	57,96%
6453.BDG.001	UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	3.726.063.000	2.159.543.000	57,96%
051	Dukungan Operasional Penyaluran Modal Usaha KP	2.892.815.000	1.739.053.700	60,12%
052	Layanan Pengelolaan Kemitraan dan Pendampingan Usaha	833.248.000	420.489.300	50,46%
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.404.800.000	858.468.100	61,11%
6452.BIF.001	Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1.404.800.000	858.468.100	61,11%
051	Layanan Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Modal Usaha	1.404.800.000	858.468.100	61,11%
6453.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	42.244.509.000	37.552.953.618	88,89%
6453.EBA.962	Layanan Umum	41.705.009.000	37.134.095.818	89,04%
051	Dukungan Tata Usaha, Kepegawaian, Hukum dan Humas	40.552.809.000	36.372.800.518	89,69%
052	Dukungan Perencanaan Strategis Bisnis dan Anggaran	1.152.200.000	761.295.300	66,07%
6453.EBA.994	Layanan Perkantoran	539.500.000	418.857.800	77,64%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	539.500.000	418.857.800	77,64%
6453.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	154.000.000	95.159.640	61,79%
6453.EBB.951	Layanan Sarana Internal	154.000.000	95.159.640	61,79%
051	Layanan Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komputasi, Peralatan Perakantoran serta Peralatan dan Mesin	154.000.000	95.159.640	61,79%
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.263.900.000	800.990.400	63,37%
6453.FAE.001	Laporan Pengelolaan Keuangan	966.200.000	662.844.900	68,60%
051	Layanan Operasional dan Pengelolaan Keuangan BLU	966.200.000	662.844.900	68,60%
6453.FAE.002	Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Usaha	244.500.000	138.145.500	56,50%
051	Layanan Pengawasan dan Pemeriksaan Intern	244.500.000	138.145.500	56,50%
6453.FAE.003	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	53.200.000	-	0,00%
051	Layanan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	53.200.000	-	0,00%

2) Efisiensi Anggaran

Efisiensi sendiri memiliki arti penghematan sumber daya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma. Mencapai suatu tujuan atau hasil yang sesuai dengan rencana atau harapan.

Demikian dengan efisiensi anggaran dalam pencapaian keluaran atau output target pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2022. LPMUKP melakukan efisiensi anggaran dalam rangka menyeleaskan antara penggunaan sumber daya atau dalam hal ini merupakan anggaran dengan output yang dicapai. Pada prinsip penganggaran pun BLU dituntut untuk mengedepankan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran yang digunakan oleh LPMUKP sepanjang Tahun Anggaran 2022, dilakukan perhitungan sesuai dengan Tabel 3.34.

Tabel 3.34 Perhitungan Efisiensi Anggaran LPMUKP Tahun 2022

(Dalam Rp.000,-)

NO	Sasaran Kegiatan		NPSK*	Satker	Total			% NPSP x Anggaran Per SK	% Efisiensi Anggaran
					Anggaran	Realisasi	%		
1	2		3	4	5	6	7	8=3x5	9=8-6
1	SK1	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	93,41%	LPMUKP	48.793.272	41.467.114	84,99	45.577.795	4.110.680
Jumlah Anggaran SK1					48.793.272	41.467.114			
Total LPMUKP					48.793.272	41.467.114	84,99	45.577.795	4.110.680
								%Efisiensi =9/5	0,08%

*Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai efisiensi anggaran LPMUKP, diperoleh nilai sebesar 0,08%. Artinya LPMUKP masih mengupayakan pelaksanaan efisiensi anggaran pada Tahun 2022. IKU yang khusus dilakukan efisiensi anggaran secara penuh adalah Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup LPMUKP, dimana dalam pencapaiannya LPMUKP hanya menerapkan monitoring pengisian aplikasi bitrix yang anggarannya sama sekali tidak diakomodir dalam RKAKL LPMUKP Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program pengelolaan dana bergulir Tahun Anggaran 2022, LPMUKP terus berupaya memberikan inovasi terhadap program penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun Anggaran 2022, LPMUKP telah menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat dengan total penyaluran dana bergulir sebesar Rp.133.229.750.000,00 dengan total jumlah pemanfaat sebesar 1.735 Orang dengan akumulasi total penyaluran dari November 2017 hingga 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.005.846.548.490,00.

Perolehan PNBP BLU secara umum belum dapat melampaui target yang ditentukan, realisasi PNBP BLU Tahun 2022 sebesar Rp.43.629.424.825,00 yang terdiri atas pendapatan jasa layanan sebesar Rp.22.038.767.332,00 dan pendapatan non jasa layanan sebesar Rp.21.590.657.493,00.

Selanjutnya, LPMUKP dari sisi kesehatan pinjaman yang diukur dengan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan realisasi yang berarti kurang baik secara performa dikarenakan pada pengukuran Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, semakin rendah nilainya maka semakin baik capaiannya atau dengan kata lain polarisasi pengukurannya adalah minimize.

Untuk mendukung pengelolaan BLU yang modern, LPMUKP memiliki Indikator Kinerja persentase penyelesaian modernisasi BLU dimana pada Taun 2022 LPMUKP telah berupaya dalam memenuhi variabel-variabel yang menjadi penilaian modernisasi BLU meskipun belum dapat tercapai dengan maksimal, variabel tersebut adalah Operasionalisasi BIOS, Penyediaan Website, Desain Sistem Informasi pada BLU yang Terintegrasi, Database Terpusat/Terintegrasi, Dashboard, dan SOP Pengelolaan IT.

Selain itu, dari sisi pencapaian kinerja aspek non layanan, LPMUKP juga telah mengupayakan optimalisasi realisasi untuk beberapa Indikator Kinerja yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP, Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2021 dan Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP.

Secara umum, capaian kinerja LPMUKP Tahun 2022, realisasi kinerja LPMUKP berdasarkan aplikasi kinerjaku adalah sebesar **93,41%** dan termasuk dalam kategori cukup baik. Indikator Kinerja yang capaiannya belum optimal adalah Realisasi PNBP BLU, Realisasi Penyaluran Dana Bergulir, Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, Modernisasi BLU, Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup LPMUKP, Nilai Kinerja Anggaran.

Dari 10 Indikator Kinerja yang menjadi target LPMUKP pada tahun 2022, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang tidak mencapai target yaitu realisasi PNBP BLU, realisasi penyaluran dana bergulir, rasio dana bergulir diragukan tertagih, modernisasi BLU, nilai kinerja anggaran LPMUKP, nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP, dan persentase realisasi anggaran LPMUKP.

2. Saran

Guna meningkatkan kinerja pada Tahun Anggaran selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan LPMUKP guna meningkatkan capaian kinerja dalam meningkatkan layanan pada program pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. LPMUKP mengimplementasikan pola penyaluran dana bergulir yang telah disesuaikan untuk mendukung pembiayaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. LPMUKP agar mengupayakan optimalisasi PNBP BLU terutama yang bersumber dari jasa layanan. Tentunya optimalisasi ini juga selaras dengan aktivitas penyaluran dana bergulir agar PNBP yang terealisasi dapat menunjang aktivitas belanja BLU serta melakukan upaya *controlling* terhadap penerimaan jasa layanan yang bersumber dari bunga salah satunya dengan melakukan upaya penagihan bunga pinjaman.
3. Dalam rangka menekan rasio dana bergulir tertagih, LPMUKP agar dapat melakukan penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan penagihan pokok pinjaman dan menerapkan mitigasi risiko terhadap pinjaman dana bergulir.
4. Selanjutnya LPMUKP agar dapat melakukan pemenuhan jumlah SDM yang menangani Teknologi Informasi guna mendukung realisasi modernisasi BLU.
5. Terhadap capaian nilai rekonsiliasi kinerja, LPMUKP akan mengupayakan pencapaian optimal pada aspek ketepatan melalui administratif yang sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mengupayakan pencapaian optimal pada aspek ketercapaian dengan mengoptimalkan capaian-capaian Indikator Kinerja pada Tahun Anggaran selanjutnya.
6. Terkait dengan pelaksanaan realisasi anggaran LPMUKP akan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran dan pencapaian output kegiatan dengan melaksanakan monitoring anggaran bulanan dan pencapaian target yang telah ditentukan dengan harapan dapat meningkatkan nilai realisasi penyerapan anggaran dan nilai kinerja anggaran LPMUKP.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nengah Putra Winata**

Jabatan : Direktur LPMUKP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **27** Mei 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal


Antam Novambar

Pihak Pertama
Direktur LPMUKP


I Nengah Putra Winata

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBK Badan Layanan Umum (Rp.)	48.793.272.000
		2	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	600.000.000.000
		3	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 5
		4	Modernisasi BLU (%)	100
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP (Nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	81
		7	Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	88
		8	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2021 lingkup BLU LPMUKP (%)	100
		9	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	70
		10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	85

Data Anggaran

No.	KEGIATAM /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	48.793.272.000
Total Anggaran LPMUKP Tahun 2022		48.793.272.000

Jakarta, ~~27~~ Mei 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Antan Novambar

Pihak Pertama
Direktur LPMUKP

I Nengah Putra Winata

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor : 001 /MM/LPMUKP/II/2023

Yth : Kepala Biro Perencanaan KKP
Dari : Plh. Direktur LPMUKP
Hal : Penyampaian Hasil Capaian Persentase PNBP BLU LPMUKP Triwulan IV
Tahun 2022
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 06 Januari 2023

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran IKU Persentase PNBP BLU periode Triwulan IV Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target PNBP BLU pada level 1 dengan Indikator Kinerja berupa Persentase Realisasi PNBP BLU target yang disepakati adalah sebesar 97%. Sementara target PNBP pada level 2 dengan Indikator Kinerja berupa Realisasi PNBP BLU, target yang disepakati adalah sebesar Rp.48.793.272.000,00.
2. Realisasi PNBP BLU per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.43.587.077.302,00 dengan rincian pendapatan yang bersumber dari bunga pinjaman dana bergulir sebesar Rp.20.022.113.193,00, pendapatan dari jasa provisi pinjaman sebesar Rp.1.970.771.250,00, pendapatan dari jasa layanan perbankan sebesar Rp.21.482.959.074,00, dan pendapatan lainnya sebesar Rp.111.233.785,00.
3. Berdasarkan realisasi PNBP BLU per 31 Desember 2022, maka dapat kami sampaikan realisasi dan capaian terhadap target level 1 dan 2 sebagai berikut:

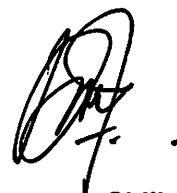
Kontrak Kinerja	Uraian IKU	Target	Realisasi	Capaian
Level 01	Persentase Realisasi PNBP BLU	97%	89,33%	92,09%
Level 02	Realisasi PNBP BLU	48.793.272.000	43.587.077.302	89,33%

4. Kendala pencapaian target realisasi PNBP BLU pada Tahun 2022 secara umum adalah sebagai berikut:
 - a) Realisasi PNBP BLU selaras dengan jumlah *outstanding* penyaluran dana bergulir dan kesehatan pengembalian pinjaman dana bergulir berupa bunga pinjaman. Penyaluran dana bergulir sendiri tengah dilakukan evaluasi dan difokuskan untuk memproses dan menyelesaikan proposal yang telah diajukan oleh para pelaku usaha perikanan sebelum dilakukannya evaluasi proses bisnis LPMUKP. Sehingga hal tersebut berdampak pada jumlah penyaluran dana bergulir yang baru dan otomatis berdampak pula pada

penerimaan bunga pinjaman yang relatif jumlahnya sama dengan penerimaan sebelumnya dikarenakan adanya pengembalian dana bergulir yang mengurangi jumlah *outstanding* pinjaman. Kemudian dampak dari jumlah penyaluran Tahun 2022 tersebut juga berdampak pada penerimaan jasa provisi BLU sehingga dari sisi pendapatan jasa layanan LPMUKP memperoleh jumlah yang kurang optimal;

- b) Sementara itu, pada Tahun 2022 juga sempat dilakukan koreksi atas bunga perbankan untuk instrumen investasi jangka pendek. Hal tersebut juga berdampak pada pendapatan non jasa layanan yang sebetulnya dapat menunjang realisasi PNBK pada saat tengah dilakukannya proses bisnis penyaluran dana bergulir dimaksud.
5. Dalam rangka persiapan pencapaian target IKU Tahun 2023, dengan melihat *history* kinerja dan permasalahan yang dihadapi sepanjang Tahun 2022, LPMUKP akan melakukan beberapa hal berikut:
- a) Optimalisasi penyaluran dana bergulir melalui dukungan pembiayaan program prioritas KKP, sehingga dengan optimalisasi penyaluran tersebut diharapkan LPMUKP akan memperoleh pendapatan yang selaras dengan target yang disusun berdasarkan proyeksi *cashflow* keuangan LPMUKP Tahun 2023. Dari kegiatan penyaluran dana bergulir melalui dukungan pembiayaan program prioritas KKP, LPMUKP dapat menunjang target pendapatan jasa layanan;
 - b) Selanjutnya, LPMUKP juga akan melaksanakan kegiatan *beauty contest* dalam rangka optimalisasi pendapatan non jasa layanan melalui penempatan dana kelolaan kepada mitra kerjasama bisnis LPMUKP yang memiliki *rate* terbaik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Darmawah Sidik

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KKP
2. Kepala Biro Keuangan

Lampiran

Tabel 1. Rincian Target dan Realisasi PNBPN BLU per Triwulan Tahun 2022

(Dalam Rp.000)

Uraian	Target Penerimaan 2022					Realisasi				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
PNBP Jasa Layanan	6.440.649	7.425.353	8.561.165	10.048.912	32.476.081	6.022.604	5.293.760	5.792.192	4.884.329	21.992.884
Pendapatan Tarif Pembiayaan Dana Bergulir	5.540.649	5.962.853	6.423.665	7.236.412	25.163.581	4.992.891	4.927.862	5.441.102	4.660.259	20.022.113
Pendapatan Provisi dan Administrasi Pembiayaan Dana Bergulir	900.000	1.462.500	2.137.500	2.812.500	7.312.500	1.029.714	365.898	351.090	224.070	1.970.771
PNBP Non Jasa Layanan	4.041.446	3.420.392	2.339.375	6.515.976	16.317.190	3.897.335	4.178.321	6.148.222	7.370.315	21.594.193
Giro	-	-	-	-	-	3.897.335	1.913.521	1.725.843	1.127.499	8.664.198
Deposito	4.041.446	3.420.392	2.339.375	6.515.976	16.317.190	0	2.218.910	4.385.571	6.214.281	12.818.761
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-	-	-	0	0	36.808	25.000	61.808
Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-	-	0	45.890	0	3.535	49.426
Total PNBPN	10.482.095	10.845.746	10.900.541	16.564.889	48.793.272	9.919.939	9.472.080	11.940.414	12.254.644	43.587.077

Tabel 2. Rincian Realisasi PNBPN BLU per 31 Desember 2022

Bulan	424911	424134	424139	424915 / 424916	424919	PNBPN
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	Penerimaan Kembali Belanja BLU Tahun Anggaran yang Lalu	Pendapatan Lain-lain BLU	
Januari	1.420.642.413	308.610.000	1.335.339.391	0	0	3.064.591.804
Februari	1.639.645.025	352.853.750	1.275.563.537	0	0	3.268.062.312
Maret	1.932.603.251	368.250.000	1.095.945.554	0	0	3.396.798.805
April	1.786.186.965	157.450.000	1.001.633.708	0	45.890.252	2.991.160.925
Mei	1.561.626.128	78.610.000	1.601.613.993	0	0	3.241.850.121
Juni	1.580.049.028	129.837.500	1.719.669.158	0	0	3.429.555.686
Juli	2.069.760.170	177.000.000	2.131.636.558	10.000.000	0	4.388.396.728
Agustus	1.673.368.448	24.990.000	1.842.787.738	26.808.167	0	3.567.954.353
September	1.697.973.034	149.100.000	2.136.989.548	0	0	3.984.062.582
Oktober	1.504.792.245	119.745.000	1.804.049.663	0	0	3.428.586.908
November	1.938.372.738	25.725.000	2.668.785.578	25.000.000	0	4.657.883.316
Desember	1.217.093.748	78.600.000	2.868.944.648	0	3.535.366	4.168.173.762
Total	20.022.113.193	1.970.771.250	21.482.959.074	61.808.167	49.425.618	43.587.077.302

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor : 02/MM/LPMUKP/II/2023

Yth : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Plh. Direktur LPMUKP
Hal : Penyampaian Hasil Capaian Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP Triwulan IV Tahun 2022
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 06 Januari 2023

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran IKU Penyaluran Dana Bergulir periode Triwulan IV Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target Penyaluran Dana Bergulir BLU pada level 1 dengan Indikator Kinerja berupa Persentase Realisasi Dana Bergulir target yang disepakati adalah sebesar 80%. Sementara target Penyaluran Dana Bergulir pada level 2 dengan Indikator Kinerja berupa Realisasi Penyaluran Dana Bergulir, target yang disepakati adalah sebesar Rp.600.000.000.000,00.
2. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.133.229.750.000,00. Untuk rincian penyaluran dana bergulir per sektor usaha serta pemanfaat nya terdapat pada Lampiran Memorandum.
3. Berdasarkan realisasi PNBPN BLU per 31 Desember 2022, maka dapat kami sampaikan realisasi dan capaian terhadap target level 1 dan 2 sebagai berikut:

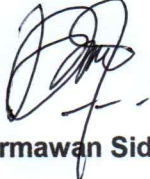
Kontrak Kinerja	Uraian IKU	Target	Realisasi	Capaian
Level 01	Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir	80%	27,75%	22,76%
Level 02	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir	600.000.000.000	133.229.750.000	22,20%

4. Kendala pencapaian target realisasi Penyaluran Dana Bergulir pada Tahun 2022 secara umum adalah sebagai berikut:
 - a) Pada Tahun Anggaran 2022, LPMUKP fokus dalam melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan penyaluran dana bergulir yang telah berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi layanan penyaluran pinjaman dana bergulir.
 - b) Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan, LPMUKP melakukan perubahan proses bisnis penyaluran pinjaman. Selain itu, LPMUKP juga tengah berupaya agar penyaluran pinjaman dana bergulir yang dilakukan dapat bersinergi dalam mendukung program prioritas KKP, diantaranya Program Penangkapan Ikan Terukur serta Kampung

Budidaya dan Revitalisasi Tambak.

- c) Perubahan proses bisnis serta kebijakan dukungan program prioritas KKP tersebut tentunya memerlukan penyesuaian regulasi berupa pengaturan internal serta upaya mitigasi risiko yang dilakukan.
 - d) Selain itu, sepanjang Tahun Anggaran 2022 LPMUKP juga memproses dan menyelesaikan sebanyak 3.697 proposal pinjaman yang telah diterima dengan nilai potensi pinjaman sebesar Rp1,37 Triliun namun selama ini belum dapat diproses.
 - e) Dari sejumlah 3.697 proposal yang diproses tersebut, hanya 419 proposal yang dapat disetujui dengan nilai persetujuan sebesar Rp168,3 Miliar. Rendahnya tingkat persetujuan ini disebabkan rendahnya kualitas proposal pinjaman yang diajukan.
5. Dalam rangka persiapan pencapaian target IKU Tahun 2023, dengan melihat history kinerja dan permasalahan yang dihadapi sepanjang Tahun 2022, LPMUKP akan melakukan beberapa hal berikut:
- a) Penyelesaian regulasi dan pengaturan yang diperlukan baik terkait penyesuaian proses bisnis yang dilakukan maupun dukungan penyaluran pinjaman pada program prioritas KKP.
 - b) Mendorong optimalisasi penyaluran dana bergulir berupa dukungan pada program prioritas KKP dengan pendampingan model bisnis, manajemen bisnis dan teknologi
 - c) Melakukan perbaikan pola pelayanan agar semakin dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat.
 - d) Memberikan pembekalan dalam rangka peningkatan kompetensi kepada tenaga pendamping dan pegawai BLU LPMUKP melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penyaluran dana bergulir untuk meningkatkan kualitas proposal pinjaman serta optimalisasi layanan penyaluran dana bergulir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.


Darmawan Sidik

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Keuangan

Lampiran

Tabel 1. Data Penyaluran Dana Bergulir Menurut Sektor Usaha Perikanan per 31 Desember 2022

Sub Sektor Usaha	Nilai Pencairan	Pemanfaat	Rata-rata
Perikanan Budidaya	72.537.750.000	894	81.138.422
Perikanan Tangkap	31.102.000.000	457	68.056.892
Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	27.855.000.000	353	78.909.348
Usaha Garam Rakyat	1.435.000.000	30	47.833.333
Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	300.000.000	1	300.000.000
TOTAL	133.229.750.000	1.735	76.789.481

Realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2022

Rasio dana bergulir diragukan adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan *outstanding* Piutang Dana Bergulir.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 131/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Kodefikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012, dirumuskan acuan sebagai berikut:

- 1) Perhitungan rasio *Non Performing* (NPF) adalah Pembiayaan (Kurang Lancar, Diragukan, Macet)/ Total Pembiayaan.
- 2) Pembiayaan (Kurang Lancar, Diragukan, Macet) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- 3) Peringkat Komposisi Bank yang dikategorikan secara umum sangat sehat dan secara umum sehat, adalah yang antara lain memnuhi rasio NPF kurang dari 5%.

Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan data kolektibilitas debitur LPMUKP adalah sebesar Rp.52.679.915.587 dari *outstanding* pinjaman sebesar Rp.636.995.516.741 dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan Rasio Dana Bergulir Tertagih berdasarkan Manual IKU adalah sebagai berikut:

$$\text{RDBDT} = \frac{\text{Jumlah Dana Bergulir Kurang Lancar, Diragukan dan Macet}}{\text{Jumlah outstanding Piutang Dana Bergulir}} \times 100\%$$

$$\text{RDBDT} = \frac{52.679.915.587}{636.995.516.741} \times 100\%$$

$$\text{RDBDT} = \mathbf{8,25\%}$$

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.52.679.915.587 merupakan nilai penyisihan piutang pokok dari hasil akumulasi *outstanding* pokok senilai Rp.636.995.516.741 dikurang dengan nilai penyisihan jaminan sesuai dengan kualitas piutang setiap debitur.

Secara persentase jika dibandingkan dengan *outstanding* pinjaman maka nilai NPL pada tahun 2022 adalah sebesar 8,25% terjadi kenaikan yang cukup tinggi jika di bandingkan pada tahun 2021.

Meningkatnya angka NPL pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa debitur yang mengalami masalah cash flow sebelum pandemi Covid-19 merebak. Setelah pandemi terjadi,

arus kas debitur tersebut semakin terganggu dan berkembang menjadi kredit macet. Selanjutnya ada beberapa kelompok yang gagal melakukan restrukturisasi pada akhir tahun 2022 sehingga berpotensi meningkatnya NPL.

Selain, itu debitur yang sudah direstrukturisasi sebelumnya belum dapat memperbaiki kinerja keuangannya karena terdampak *covid-19* dan sebagian besar debitur LPMUKP adalah nelayan dan pembudidaya yang secara langsung terdampak akibat tidak dapat memasarkan hasil produksi sehingga menekan keuntungan yang dapat diperoleh dalam usahanya yang secara langsung berdampak pada kemampuan dalam membayar angsuran.

Sejak tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022 terjadi serangan penyakit pada kegiatan budidaya udang vaname yang berakibat gagal panen hal ini terlihat dari 29% penyumbang angka NPL adalah dari sector budidaya udang vaname, hal ini juga di perparah dengan terjadinya bencana alam pada beberapa lokasi budidaya yang mengakibatkan kerusakan pada sarana budidaya.

Selain itu menurunnya kemampuan mengasur debitur juga disebabkan meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan dari factor faktor produksi yang tidak diimbangi dengan erbaikan pada harga jual produksi sehingga menurunkan pendapatan dari debitur.

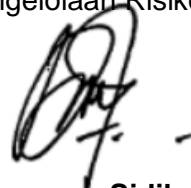
Terdapat beberapa debitur yang berisiko melakukan penundaan pembayaran angsuran yang apabila dinilai secara finansial memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran.

Strategi yang dilakukan oleh LPMUKP dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- 1) Melakukan analisa kredit berbasis risiko guna menyeleksi calon debitur yang dinilai sesuai ketentuan untuk menerima pinjaman tersebut;
- 2) Optimalisasi peran pendampingan guna memperbaiki kinerja keuangan dari debitur dan melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis yang membidangi guna mengatasi permasalahan teknis pada kegiatan usaha debitur;
- 3) Mengkaji system restrukturisasi yang tepat bagi debitur yang mengalami bencana sehingga dapat membagkitkan usaha debitur dan mengembalikan kemampuan untuk membayar angsuran;
- 4) Memaksimalkan upaya penagihan dan penyelesaian pinjaman bermasalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 5) Guna penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah yang dinilai sudah dalam kondisi tidak tertagih maka dilakukan pelipahan kepada PUPN.

Diharapkan melalui beberapa kegiatan tersebut diatas dapat memperbaiki kualitas layanan LPMUKP dan akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka rasio dana bergulir diragukan tertagih.

Jakarta, 13 Januari 2023
Kepala Divisi Keuangan dan
Pengelolaan Risiko



Darmawan Sidik

Reliasasi Modernisasi BLU Tahun 2022

No	Uraian	Skor	Bobot	Realisasi	Capaian
1	Operasionalisasi BIOS		18%		18,0%
a	Profil	10		1,5%	1,5%
	Mengelola data profil meliputi informasi umum, data pejabat, data SDM, data sistem aplikasi yang digunakan oleh BLU dan data SWOT secara update. (Target penyelesaian pada triwulan 1 dan ketika terdapat perubahan data)				
b	Layanan	10		1,5%	1,5%
	Mengelola data layanan sesuai dengan karakteristik BLU masing-masing. Untuk data layanan yang perubahannya harian, minimal dilakukan update secara bulanan. Untuk data layanan yang perubahannya bulanan atau tahunan, dilakukan update ketika terjadi perubahan. (Target penyelesaian triwulanan)				
c	Data Keuangan	10		1,5%	1,5%
	Mengelola data keuangan dengan melakukan generate laporan keuangan dan menyampaikan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan adalah: 1. Semester I 2. Tahunan Unadited 3. Tahunan Audited				
d	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	10		1,5%	1,5%
	Mengelola RBA dengan melakukan submit RBA berupa: 1. Indikatif 2. RKAKL 3. Definitif				
e	Pengelolaan Kinerja	10		1,5%	1,5%
	Mengelola data kinerja target dan realisasi kinerja layanan dan kinerja keuangan BLU. (Target penyelesaian Kontrak Kinerja Triwulan 1, Realisasi menyesuaikan ketersediaan data)				
f	Dokumentasi	10		1,5%	1,5%
	Mengelola dokumentasi BLU pada BIOS dengan memastikan dokumen-dokumen terkait disediakan pada BIOS. (Target penyelesaian Triwulan 4)				
g	Pembinaan	10		1,5%	1,5%
	Mengelola data pembinaan pada BIOS, melakukan pengisian kertas kerja pembinaan dan memberikan tanggapan atau Menyusun rencana aksi atas rekomendasi pembinaan. (Target penyelesaian sesuai dengan deadline pada rekomendasi)				

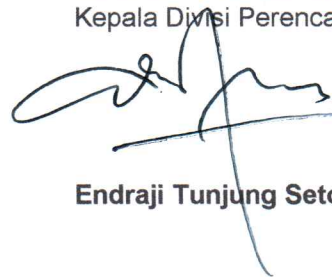
h	Dewas	10		1,50%	1,5%
	Mengelola data saran dan laporan dewas dengan memberikan tanggapan atau rencana aksi atas rekomendasi dewas. (Target penyelesaian sesuai deadline yang ditentukan)				
i	<i>Maturity Rating</i>	10		1,5%	1,5%
	Melakukan self assesment Maturity Rating pada result based (aspek keuangan dan aspek layanan) dan process based (aspek kapabilitas internal, aspek tata kelola dan kepemimpinan, aspek inovasi, dan aspek lingkungan).				
j	Rencana Strategis Bisnis (RSB)	10		1,5%	1,5%
	Mengelola data RSB dengan melakukan update ketika periode penyusunan RSB lima tahunan atau ketika terdapat revisi RSB.				
k	Tarif	10		1,50%	1,50%
	Mengelola data tarif, melakukan pengusulan tarif baru dan revisi tarif melalui BIOS, serta melakukan pelaporan pelaksanaan tarif melalui BIOS.				
l	Remunerasi	10		1,5%	1,5%
	Mengelola data remunerasi dengan melakukan proses usulan remunerasi baru atau usulan revisi remunerasi melalui BIOS.				
2	Penyediaan Website		10%		9,0%
a	Penyediaan Website			4,0%	4,0%
	Tersedia website yang mudah diakses, memiliki performance yang baik dan user friendly (navigasi mudah dipahami pengunjung).				
1)	Performance dan kemudahan akses	20		2,0%	
2)	Kemudahan navigasi (liquid)	20		2,0%	
b	Fungsi Website			5,0%	5,0%
	Tersedia website yang memiliki fungsi paling tidak menginformasikan dan/atau digunakan sebagai:				
1)	Profil BLU	10		1,0%	
2)	Layanan BLU	10		1,0%	
3)	Tarif Layanan	10		1,0%	
4)	Sarana Pengaduan	10		1,0%	
5)	Sarana Survey Layanan dan	10			
6)	Hasil Survey Layanan	10		1,00%	
3	Desain Sistem Informasi pada BLU yang Terintegrasi		12%		7,50%
a	Menyusun dokumen perencanaan sistem informasi yang terintegrasi				4,50%
1)	Melakukan identifikasi seluruh proses bisnis yang memerlukan dukungan teknologi informasi	10		1,50%	1,50%
2)	Merencanakan sumber daya (SDM dan dana) untuk mendukung pengembangan sistem	10		1,50%	1,50%
3)	Menyusun prioritas pengembangan sistem informasi	10		1,50%	1,50%
b	Menyusun dokumen analisis sistem informasi yang terintegrasi				3,00%
1)	Menyusun dokumen analisis sistem informasi terhadap seluruh proses bisnis yang telah dilakukan proses identifikasi	10		1,50%	1,50%

2)	Melakukan analisis kelayakan teknis, ekonomis, legal, dan operasional	10			0,00%
3)	Melakukan analisis rancangan input, proses dan output	10		1,50%	1,50%
c	Menyusun dokumen rancangan arsitektur sistem informasi yang terintegrasi	20			0,00%
4	Database terpusat/terintegrasi		22%		16,0%
a	Melakukan proses integrasi intern sistem informasi keuangan				8,00%
1)	Integrasi data penerimaan	8		1,60%	1,60%
2)	Integrasi data pengeluaran	8		1,60%	1,60%
3)	Integrasi data saldo rekening, termasuk integrasi dengan sistem perbankan	6		1,20%	1,20%
4)	Integrasi data utang dan piutang	6		1,20%	1,20%
5)	Integrasi data investasi	6		1,20%	1,20%
6)	Integrasi data penganggaran	6		1,20%	1,20%
b	Melakukan proses integrasi intern sistem informasi layanan				4,00%
1)	Integrasi sistem registrasi	10			0,00%
2)	Integrasi sistem proses layanan	10			0,00%
3)	Integrasi sistem monitoring dan evaluasi data layanan	10		2,00%	2,00%
4)	Integrasi sistem pasca layanan	10		2,00%	2,00%
c	Melakukan proses integrasi sistem informasi SDM				4,00%
1)	Integrasi data intern sdm (penerimaan, penilaian kinerja dll)	10		2,00%	2,00%
2)	Integrasi data sdm dengan sistem informasi keuangan	10		2,00%	2,00%
3)	Integrasi data sdm dengan sistem informasi layanan	10			0,00%
5	Dashboard		18%		8,25%
a	Tersedia dashboard keuangan	23		3,45%	3,45%
1)	Realisasi pendapatan dan belanja				
2)	Jumlah posisi kas				
3)	Saldo rekening BLU				
4)	Analisis data keuangan				
b	Tersedia dashboard layanan	14		2,1%	2,10%
1)	Kinerja layanan baik yang terdapat pada kontrak kinerja pemimpin BLU maupun tidak				
2)	Analisis data layanan				
c	Tersedia dashboard SDM	18		2,70%	2,70%
1)	Komposisi SDM				
2)	Profil SDM				
3)	Analisis data SDM (analisis kebutuhan, analisis beban kerja, analisis kinerja, analisis kebutuhan pengembangan kapasitas(<i>training need analisis</i>), dll				
d	Membangun dashboar lainnya	65			0,00%
6	SOP Pengelolaan IT		20%		16,0%
	Tersedia SOP terkait dengan pengelolaan IT pada BLU. Dokumen SOP dimaksud diunggah pada aplikasi BIOS melalui modul dokumentasi sesuai dengan jenis dokumennya.				
a	SOP Pengelolaan dan updating BIOS	10		2,00%	2,00%
b	SOP Pengelolaan dan updating data pada website	10		2,00%	2,00%
c	SOP Pengembangan sistem informasi dan sistem aplikasi pada BLU	10		2,00%	2,00%
d	SOP pemeliharaan dashboard	10			0,00%

e	SOP Pengembangan <i>webservice</i>	10		2,00%	2,00%
f	SOP Pemeliharaan <i>webservice</i>	10		2,00%	2,00%
g	SOP <i>back up</i> dan <i>restore</i> database	10		2,00%	2,00%
h	SOP Pengendalian Hak Akses Database	10		2,00%	2,00%
i	SOP Manajemen dan akses jaringan	10		2,00%	2,00%
j	SOP Manajemen Risiko Teknologi Informasi	10			0,00%
	Total				74,75%

Jakarta, 10 Januari 2023

Kepala Divisi Perencanaan dan Umum



Endraji Tunjung Seto

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
TAHUN 2022**

NAMA UNIT KERJA	SEKRETARIAT JENDERAL
NAMA UNIT YBS	LPMUKP
USER KINERJAKU	
TANGGAL REKON	08 November 2022

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	Laporan Kinerja (LKJ)			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan			ditambahkan kolom pola hitung (rata-rata, akumulasi, posisi akhir)	nomenklatur indikator kinerja program diganti menjadi indikator kinerja kegiatan		pada lampiran ditambahkan PK		

ASPEK KESesuaian	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ Tw III	PK - Kinerja	LKJ Tw III - Kinerja	LKJ Tw III - Kinerja
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	cascading Manual IKU pada beberapa indikator ada yg kosong, perlu dipahami bahwa metode cascading yang dimaksud pada manual IKU merupakan metode penurunan ke level bawahannya dari si pemilik manual IKU tsb					pada IK 5,6,7,9,10 target pada LKJ hal 13 berbeda dengan target pada PK		

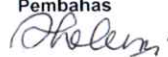


ASPEK KETERCAPIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2022		
	Tw I	Tw II	Tw III
	93,59	74,21	86,14
Skor	84,65		
Catatan	terdapat 2 IK kuning, dan 1 IK merah	terdapat 2 IK kuning, 1 IK merah, dan 1 IK minus	terdapat 3 IK kuning, dan 1 IK merah

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	80,00
Skor	90,00	
Catatan	di upload pada 11 Februari	di sampaikan ke Sekjen pada 25 Januari, sehingga telat 2 hari kerja



SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	84,65	90,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	21,16	18,00
Total Skor	89,16			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

Pembahas

 (Helena Yusfik)

 (Ikhsan Zuhry)

 (Achmat Marsito)

Unit yang di Sampling


 (Iko Prasetyo)

 (Deby)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 90/SJ.2/RC.610/I/2023

Yth. : 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
6. Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
7. Kepala Balai Pengelola Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) KKP Triwulan IV Tahun 2022

Tanggal : 13 Januari 2023

Menindaklanjuti pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) triwulan IV Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 di Bogor, Jawa Barat, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA berdasarkan data OMSPAN dan IKU NKA berdasarkan data SMART DJA dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023;
2. Capaian nilai IKU IKPA Setjen triwulan IV tahun 2022 sebesar 93,38 dari target nilai 89,00. Capaian IKPA Biro Umum dan PBJ sebesar 94,00 dari target nilai 89,00;
3. Capaian nilai IKU NKA Setjen triwulan IV tahun 2022 sebesar 87,73 dari target nilai 86,00. Capaian NKA Biro Umum dan PBJ sebesar 84,44 dari target nilai 81,00;
4. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA dan NKA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I Setjen) dan level 2 (Satker lingkup Setjen). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA dan NKA pada triwulan IV tahun 2022 pada Unit Eselon I Setjen dan Satker lingkup Setjen.

Demikian ...

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

NILAI KINERJA ANGGARAN LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun: 2022

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	10076	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	95,09	98,18	74	100	20	100
2	26221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	82,99	97,52	76,71	100	2,48	56,2
3	30012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	79,18	99,49	62,41	100	0,51	51,28
4	40093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	95,46	99,98	91,58	100	15,79	89,48
5	50064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	86,86	96,87	95,73	100	3,13	57,82
6	60032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,14	98,01	81,02	100	2,92	57,29
7	70044	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	81,69	98,99	74,54	100	1,01	52,52
8	80007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	76,69	99,65	49,32	100	0,35	50,88
9	90099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	81,61	95,34	61,73	100	4,66	61,64
10	100094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	72,05	100	25	100	0	50
11	110098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	83,5	99,79	87,21	100	0,21	50,53
12	120099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	67,82	99,99	69,99	89,06	-10,71	23,23

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR-E

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
13	130095	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	86,49	98,42	99	100	1,58	53,95
14	140097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	72,21	99,98	25,85	100	0,02	50,04
15	150098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	75,55	99,66	43,06	100	0,34	50,86
16	160094	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	85,7	100	100	100	0	50
17	175355	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	90,12	92,67	99,39	100	7,33	68,33
18	180091	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	75,71	100	45,12	100	0	50
19	190091	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	84,93	99,39	93,68	100	0,61	51,52
20	200093	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	85,67	99,95	99,64	100	0,05	50,13
21	210055	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	83,34	98,16	80,76	100	1,84	54,6
22	225127	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	85,6	99,73	98,55	100	0,27	50,67
23	235221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	70,58	99,91	16,66	100	0,09	50,21
24	249001	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	83,41	96,5	75,49	100	3,5	58,76
25	250069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	79,66	99,48	65,02	100	0,52	51,3
26	260059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	72,1	99,29	22,87	100	0,71	51,77
27	280049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	76,82	95,92	37,35	100	4,08	60,2

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
28	290095	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	85,43	100	54,75	100	11,14	77,84
29	300078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	85,16	99,98	23,54	100	18,72	96,79
30	310046	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	85,7	100	100	100	0	50
31	320014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	82,47	99,54	80,67	100	0,46	51,16
32	330036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	27,3	98,72	45,92	21,54	-20	0
33	340048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	93,35	100	63,48	100	20	100
34	417747	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA	73,93	99,39	33,28	100	0,61	51,52
35	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	84,44	99,11	91,65	100	0,49	51,22
36	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	80,19	84,99	82,72	82,73	9,24	73,1

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor : 86/SJ.7/TU.210/I/2023

Yth : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Humas Kerjasama Luar Negeri
3. Kepala Biro Keuangan
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
5. Kepala Biro Hukum
6. Kepala Biro Umum dan PBJ
7. Direktur LPMUKP

Dari : Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Hal : **Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Triwulan IV Tahun 2022**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 9 Januari 2023

Menindaklanjuti pengukuran capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan IV Tahun 2022 sudah menggunakan manual IKU Tahun 2022;
2. Nilai capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV adalah sebesar **99,81%*** dengan nilai rata-rata sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah **98,38%****.
3. Target capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2022 yang harus dipenuhi oleh masing-masing Eselon II adalah sebesar **88,00%**, sesuai arahan Sekretaris Jenderal pada saat rapat harmonisasi kinerja.
4. Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Eselon II dan 1 (satu) unit kerja setara Eselon II telah mencapai target**.
5. Adapun rincian penilaian hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

No.	Nama Eselon II	Nilai Target	Nilai Capaian Triwulan IV (%)*	Nilai Rata-rata TW I - TW IV (%)**
1.	Biro Perencanaan	88,00	100	99,79
2.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	88,00	100	93,22
3.	Biro Hukum	88,00	100	100
4.	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	88,00	100	100
5.	Biro Keuangan	88,00	100	100
6.	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	88,00	98,44	97,22
7.	Pusat Data, Statistik dan Informasi	88,00	100	100
8.	LPMUKP	88,00	100	98,44
Sekretariat Jenderal		88,00	99,81	98,38

Keterangan:

*Hasil capaian TW IV saja, nilai ini yang akan di input kedalam aplikasi kinerjajaku

**Hasil rata-rata dari TW I, TW II, TW III, dan TW IV

6. Nilai rata-rata tertinggi pada Triwulan IV Tahun 2022 sebesar **100%**** dicapai oleh 4 (empat) unit Eselon II, yaitu: Biro Hukum, Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan, serta Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Aulia Riza Farhan

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor: 2003/SJ.2/RC.610/X/2022

Yth. : 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
6. Plt. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
8. Subkoordinator Tata Usaha, Biro Keuangan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021”

Tanggal : 13 Oktober 2022

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sekretariat Jenderal periode Triwulan III Tahun 2022 dan berkenaan dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1455/ITJ.0/RC.610/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU ““Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021” diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2021 yang dibandingkan dengan besarnya realisasi anggaran Unit Kerja di lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2021.
2. Berkenaan dengan temuan di lingkup Sekretariat Jenderal pada Tahun 2021 bersifat managerial tidak ada yang bernilai material maka capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021” sebesar 0,00% (target yang ditetapkan sebesar $\leq 1\%$).

3. ...

3. Capaian IKU tahun ini mengalami peningkatan dari tahun lalu menandakan adanya perbaikan dalam kualitas laporan keuangan dari segi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Cipto Hadi Prayitno

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Memorandum
Nomor : 2003/SJ.2/RC.610/X/2022
Tanggal: 13 Oktober 2022

Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021” Tahun 2021

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Biro Perencanaan	0	0	≤1	0,00	200.00
2	Biro Keuangan	0	0	≤1	0,00	200,00
3	Biro Umum dan PBJ	320,201,513,571	0	≤1	0,00	200.00
4	Biro Hukum	0	0	≤1	0,00	200,00
5	Biro SDMAO	0	0	≤1	0,00	200.00
6	Biro Humas dan KLN	0	0	≤1	0,00	200,00
7	Pusdatin	0	0	≤1	0,00	200.00
8	LPMUKP	49,729,163,766	0	≤1	0,00	200,00
TOTAL		383,839,736,923	0	≤1	0,00	200.00

Keterangan:

1. Realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2021
2. Nilai temuan BPK atas LK Sekretariat Jenderal Tahun 2021
3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2021
4. Perhitungan % capaian adalah $[1+(1 - \text{realisasi/target})]*100$

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor 70/SJ.2/RC.510/I/2023

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Plt.Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
3. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2022

Lampiran : Satu Berkas

Tanggal : 11 Januari 2023

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sekretariat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2022 dan berkenaan dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 50/ITJ.0/TU.140/I/2023 tanggal 9 Januari 2022 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, bersama ini disampaikan Capaian IKU untuk masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” periode Triwulan IV Tahun 2022 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada Triwulan IV Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” pada periode pengukuran Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 97,86% (tuntas 137 dari 140 rekomendasi). Realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (tuntas) tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70%.
3. Sisa rekomendasi yang belum terselesaikan pada Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebanyak 2 rekomendasi dan Biro

Sumber ...

Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi sebanyak 1 rekomendasi agar menjadi perhatian untuk dapat segera ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.

4. Angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2022 disajikan sebagaimana pada Lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Lampiran Memorandum
Nomor : 70/SJ.2/RC.510/I/2023
Tanggal : 11 Januari 2023

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1.	Biro Perencanaan	13	13	100,00	0	00,00
2.	Biro Keuangan	22	22	100,00	0	00,00
3.	Biro Umum dan PBJ	40	40	100,00	0	00,00
4.	Biro Hukum	2	2	100,00	0	00,00
5.	Biro SDMAO	20	19	95,00	1	05,00
6.	Biro Humas dan KLN	12	10	83,33	2	16,66
7.	Pusdatin	10	10	100,00	0	00,00
8.	LPMUKP	21	21	100,00	0	00,00
CAPAIAN IKU SETJEN		140	137	97,86	3	02,14



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	660056 LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	48,539,272,000 41,273,720,118 (85.03%)	254,000,000 193,394,640 (76.14%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	48,793,272,000 41,467,114,758 (84.99%)
		SISA	0	7,265,551,882	60,605,360	0	0	0	0	0	0	7,326,157,242
		GRAND TOTAL	PAGU REALISASI	0 (0.00%)	48,539,272,000 41,273,720,118 (85.03%)	254,000,000 193,394,640 (76.14%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		SISA	0	7,265,551,882	60,605,360	0	0	0	0	0	0	7,326,157,242

Jakarta, 10 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Lembaga Pengelola Modal Usaha
Kelautan dan Perikanan

Darmawan Sidik